



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DP2KBP3A 2024**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN SUMBAWA

Alamat : Jln. Durian Nomor 75 Sumbawa Besar

Berita Acara Verifikasi / Reviu
Capaian Kinerja Dokumen LKjIP Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

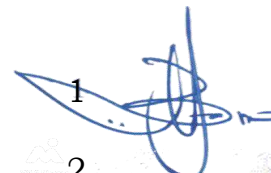
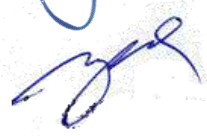
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. dr. Hj. Nieta Ariyani
Sekretaris Dinas P2KBP3A
2. A.A. Ng.Ketut Riyadi, S.K.M,M.Kes.
Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Nurfaridah, S.Kom.
Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Tati Haryati, S.Psi.
Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Anggraini, S.A.P.
Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Pada hari Senin tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-02-2025) telah melakukan verifikasi atau Reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

1. dr. Hj. Nieta Ariyani
NIP. 197805112003122007
Jabatan : Sekretaris
2. A.A.NGR. Ketut Riyadi, S.KM, M.Kes
NIP. 19690719 199203 1 007
Jabatan : Kabid Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Nurfaridah, S.Kom,MM
NIP. 19730821 199902 2 001
Jabatan : Kabid Kesetaraan Gender dan
Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Tati Haryati, S.Psi
NIP. 19770515 200501 2 020
Jabatan : Kabid Kesetaraan Gender dan
Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Anggraini, S.AP
NIP. 19760306 200701 2 014
Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk
Advokasi dan Penggerakan

1 
2 
3 
4 
5 



Mengetahui:

Plt. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

I Ketut Sumadi Arta, S.H.

NIP. 196912311994031094

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar,

Februari 2025

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



I KETUT SUMADI ARTA, SH
NIP. 19691231 199403 1 094

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar		iii
Daftar Lampiran		iv
Ikhtisar eksekutif		v
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A		2
1.3. Issu Strategis		9
BAB II PERENCANAAN KINERJA		11
2.1 Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026		11
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2024		12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi		16
BAB IV PENUTUP		43
LAMPIRAN		

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	3
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	4

Daftar Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa Nomor 49 TAHUN 2024 tentang IKU DP2KBP3A
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Berjenjang
4. Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan
6. Capaian Kinerja RKT Tahun 2024
7. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024
8. Capaian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024
9. Matrik Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2024
10. Capaian Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2024

IKhtisar Eksekutif

Salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Azas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang dijalankan, dalam konteks penerapan tata pemerintahan yang baik mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. lebih lanjut berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 mengisyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun.

LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian kinerja sebagai kebutuhan untuk analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Capaian-capaian kinerja yang tergambar dari ukuran indikator-indikator kinerja sasaran sesungguhnya merupakan kinerja seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2024 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2024 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2024, selama periode ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan 10 Program, 28 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan untuk memenuhi 5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp. 19.238.623.810,00 meliputi Belanja Pegawai Rp7.972.633.011,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.242.990.799,00; Belanja Hibah sebesar Rp23.000.000,00 dan Belanja Modal Rp118.980.000,00.

Baik secara parsial dan simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan tolok ukur dan target kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dapat dikatakan berhasil.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada kepala Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, perangkat daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra PD, Renja PD, PK, dan RKT.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Untuk memastikan keseluruhan program, dan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dapat terlaksana sesuai dengan target waktu, Kuantitas dan kualitas sasaran, maka dibuatlah perjanjian antara kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati, dan diturunkan secara

berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Sehingga Setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan, serta setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

1.2. Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan dua tugas pokok yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

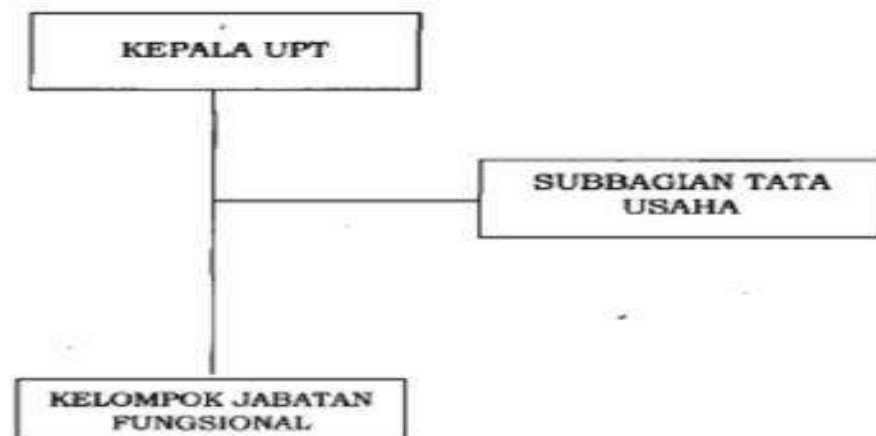
A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas :

- Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - a. Perencana Ahli Muda, dan
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
 - b. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) terdiri atas:
 - Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

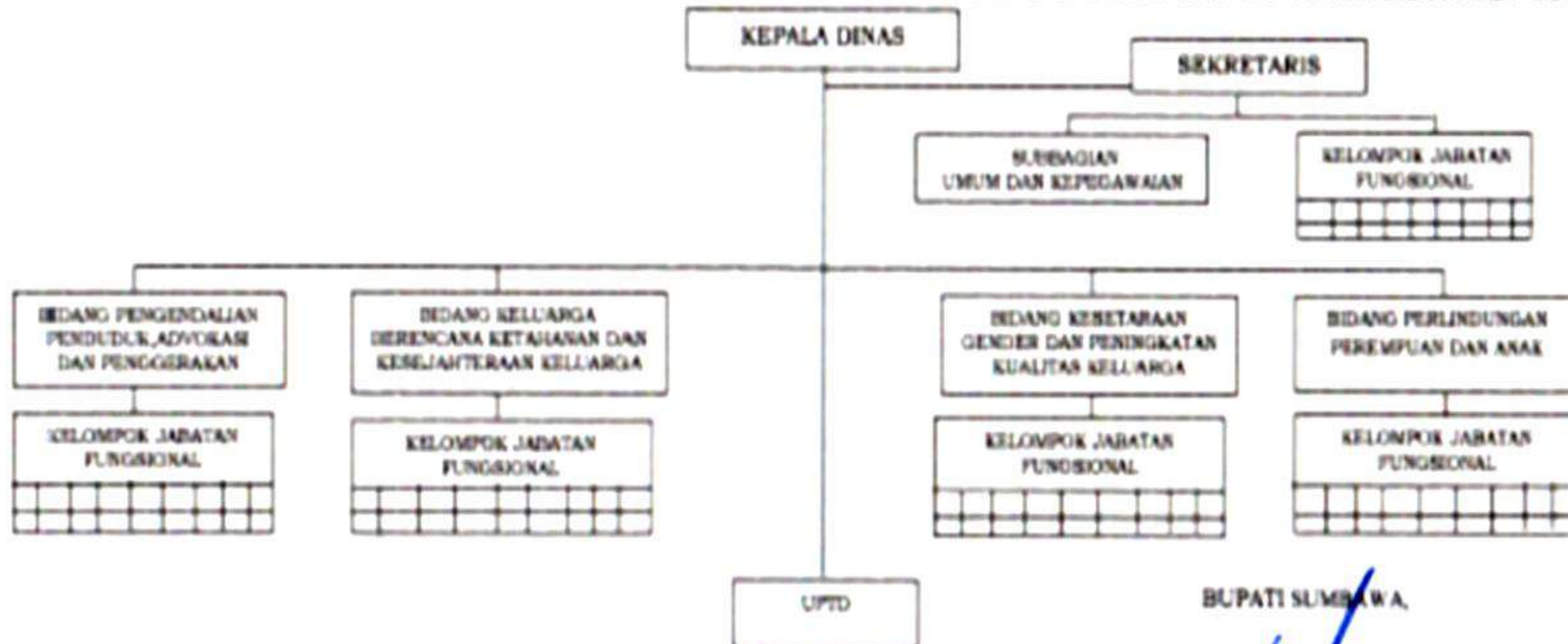
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari sekretaris dan kepala bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumbawa, Adapun tugas dan fungsi unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

a. UPT KB dan PPPA

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis KB dan PPPA melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
3. Penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
4. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
6. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. UPTD PPA

Tugas dari kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT perlindungan perempuan dan anak
2. Menyusun program kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
4. Mengevaluasi hasil kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT perlindungan perempuan dan anak

6. Melaksanakan administrasi UPT perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan sebagai berikut :

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat	1. Kepadatan penduduk antar kecamatan belum proposional
2.	Keluarga Berencana	2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih kurangnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga melalui program KB
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3. Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan
4.	Perlindungan perempuan dan anak	4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
5.	Kualitas keluarga,	5. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	5. Masih rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender
6.	Perlindungan khusus anak	6. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak masih rendah

Tabel 1.1. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan dua (2) urusan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

2.1. Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026, yaitu Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, yang dilaksanakan melalui 4 Misi yaitu :

- (1) Sumbawa Sehat dan Cerdas dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan,

- (2) Sumbawa Sejahtera dan Mandiri dengan Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata,
- (3) Sumbawa Bersih dan Melayani dengan Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat dan efisien,
- (4) Sumbawa Aman dan Berbudaya dengan Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

a. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kesehatan (AHH)
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)
			Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera
			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A
			Indeks Pembangunan Gender
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD
			Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, maka dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kesehatan serta kualitas perempuan dan anak dengan peningkatan layanan pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Penguatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2024

Untuk dapat mengukur kinerja sebuah organisasi perlu ditetapkan target kinerja organisasi yang akan digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran

kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026. Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.77
Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	88
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB
Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Persen	13
Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	707

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2024

Target kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan target pencapaian organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun keempat pencapaian Rencana Strategis 2021-2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sumbawa bahwa terdapat 5 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- 1). Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan indikator kinerja utama yaitu Angka Kelahiran Total (TFR),
- 2). Meningkatnya persentase keluarga sejahtera dengan indikator kinerja utama adalah Cakupan Keluarga Sejahtera,
- 3). Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama yaitu Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A,
- 4). Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah dengan indikator kinerja utama adalah Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD, dan
- 5). Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dengan indikator kinerja utama adalah Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya.

Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan / atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Adapun capaian sasaran strategis kinerja utama Dinas P2KBP3A pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKU Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.77	2.45	112.92
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88.00	83.97	95.42
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	100
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13.00	69.22	532.46
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	707	775.46	109.68
Rata - Rata			%	212.62		
Tinggi			%	532.46		
Rendah			%	95.42		

Terhadap IKU, Pengukuran capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab Data
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	$TFR = \frac{1}{1.000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 \right] ASFR_i$	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari segi ekonomi sosial dan budaya	$\text{Persentase Keluarga Sejahtera} = \frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga (KK)}} \times 100$	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah	Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai = 90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80, Predikat B (Baik) - Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60	Sekretariat
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda.	$\text{Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD} = \frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD}} \times 100$	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan	Komponen yang dinilai, yaitu 1. Kelembagaan (16,40%) dengan nilai maksimal 164 Poin, 2. Hak Sipil dan Kebebasan (11,50%) dengan nilai maksimal 115 Poin, 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (15,60%) dengan nilai maksimal 156 Poin, 4. Kesehatan dan Kesejahteraan (15,00%) dengan nilai maksimal 150 Poin, 5. Pendidikan, Pemfaatan Waktu Luang (11,00%) dengan nilai maksimal 110 Poin, 6. Perlindungan Khusus (20,50%) dengan nilai maksimal 205 Poin, 7. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan (10,00%) dengan nilai maksimal 100 Poin	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, disusun sesuai Perjanjian Kinerja yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.77	2.45	112.92	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88.00	83.97	95.42	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13.00	69.22	532.46	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	707	775.46	109.68	Sangat Tinggi
Rata - Rata			%	212.62			
Tinggi			%	532.46			
Rendah			%	95.42			

c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun n-1 2023	Capaian Tahun n 2024	Naik / Turun
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.39	2.45	0.06
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	85.01	83.97	-1.04
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	0.56
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	47.13	69.22	22.09
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	503	775.46	154.17

d. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun Akhir	Realisasi Tahun n (2024)	Keterangan
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.39	2.45	Tercapai
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	85.01	83.97	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	Tercapai
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	47.13	69.22	Tercapai
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	503	775.46	Tercapai

e. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun n (2024)	Realisasi Pem Prov Tahun n	Realisasi Nasional Tahun n	Keterangan
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.45	2.37	2.11	
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	83.97			Tidak dilakukan pembandingan dengan realisasi provinsi dan nasional, karena data tidak ditemukan
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	BB	
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	69.22	1.79	81.85	
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	775.46	677.10		Tidak dilakukan pembandingan terhadap realisasi kinerja nasional, Karena Indonesia layak anak akan terwujud jika seluruh kabupaten / kota dan provinsi telah menjadi KLA/PROVILA

f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan Pencapaian Target kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja		Alternatif Solusi/Strategi yang akan dilakukan	
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,45	1	Angka ber-KB yang tidak terpenuhi	1	Menurunkan angka ber-KB yang tidak terpenuhi dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
				2	Peran/fungsi penyuluh lapangan KB (PLKB) belum optimal, baik dari kuantitas maupun kualitasnya	2	Optimalisasi peran tenaga lini lapangan dalam penurunan unmet need melalui penajaman sasaran unmet need by name by address untuk diberikan KIE KB.
				3	Tingkat pelayanan KB pasca persalinan masih rendah	4	Meningkatkan KB pascapersalinan untuk menjaga jarak kelahiran melalui pendampingan ibu hamil oleh PKB/PLKB, PPKBD dan sub PPKBD;
				4	Masih terjadinya perkawinan usia muda	5	Meningkatkan promosi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	83,97	1	Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan	1	Merlaksanakan sosialisasi dan pendampingan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	1	Hasil evaluasi atas AKIP Dinas P2KBP3A menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.	1	Melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	69,22	1	Perencanaan dan penganggaran responsif gender baru menjadi kepedulian beberapa unit kerja dan belum menyeluruh	1	Pendampingan penyusunan PPRG kepada seluruh perangkat daerah
				2	Adanya keterbatasan pengetahuan aparaturnya pada perangkat daerah	2	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan PPRG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	775,46	1	Kelembagaan KLA di level kabupaten belum sepenuhnya dapat berjalan, seperti di dalam internal kelembagaan itu sendiri belum berjalan koordinasi yang baik antar OPD yang merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA.	1	Meningkatkan peran Bappeda sebagai ketua Gugus Tugas KLA untuk mengoptimalkan koordinasi antar OPD yang tergabung di dalam Gugus Tugas KLA
				2	Masih banyak aturan yang belum terbentuk untuk mendukung terwujudnya KLA		Menyusun dan mengusulkan rancangan pembentukan regulasi yang menunjang terwujudnya KLA
				3	Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan klaster belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pencapaian tiap-tiap klaster belum terpenuhi secara keseluruhan dan masih dibawah target rencana pencapaian yang telah ditetapkan.		Melakukan pemetaan terhadap hak anak yang belum terpenuhi berdasarkan klaster dan melakukan advokasi kepada instansi dan stakeholder terakit untuk penuhannya dan disertai data dukung yang valid.
				4	Belum optimalnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) Peran Lembaga Masyarakat, OPD lain, Dunia Usaha dan Media Massa		Melakukan refresing terhadap tenaga yang pernah dilatih konvensi hak anak dan melakukan pelatihan untuk yang belum pernah mendapatkan pelatihan konvensi hak anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi
				5	Keikutsertaan perwakilan anak dalam forum musrenbang hanya seremonial, sementara suara anak dalam forum musrenbang belum dapat di realisasikan secara nyata	Melakukan advokasi untuk terkait pemenuhan aspirasi atau suara anak yang di sampaikan dalam forum musrenbang

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa	Kategori Nilai AKIP PD	8,586,004,397.00	8,718,809,810.00	8,491,140,639.00	101.55	97.39	
1.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Nilai AKIP PD	8,586,004,397.00	8,718,809,810.00	8,491,140,639.00	101.55	97.39	SEKRETARIS
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	367,878,599.00	106,428,599.00	40,438,077.00	28.93	38.00	
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	27,375,200.00	27,375,200.00	24,282,477.00	100.00	88.70	
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,136,280.00	3,136,280.00	1,962,500.00	100.00	62.57	
1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,641,280.00	1,641,280.00	1,488,000.00	100.00	90.66	
1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,881,280.00	1,881,280.00	1,877,500.00	100.00	99.80	
1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,641,280.00	1,641,280.00	1,488,000.00	100.00	90.66	
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,304,280.00	4,304,280.00	2,632,500.00	100.00	61.16	
1.1.1.7	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	327,898,999.00	66,448,999.00	6,707,100.00	20.27	10.09	
1.1.2	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	7,612,212,398.00	7,966,427,811.00	7,936,295,363.00	104.65	99.62	
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,516,385,598.00	7,866,601,011.00	7,839,118,563.00	104.66	99.65	
1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79,840,000.00	83,840,000.00	81,190,000.00	105.01	96.84	
1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,740,000.00	4,740,000.00	4,740,000.00	100.00	100.00	
1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	100.00	100.00	
1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,256,200.00	2,256,200.00	2,256,200.00	100.00	100.00	
1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	100.00	100.00	
1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,940,600.00	1,940,600.00	1,940,600.00	100.00	100.00	
1.1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	100.00	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
1.1.3	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang disusun	137,182,250.00	137,182,250.00	114,459,602.00	100.00	83.44	
1.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24,856,250.00	24,856,250.00	7,795,000.00	100.00	31.36	
1.1.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00	0.00	
1.1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,208,000.00	7,208,000.00	4,082,500.00	100.00	56.64	
1.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102,718,000.00	102,718,000.00	102,582,102.00	100.00	99.87	
1.1.4	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	72,240,000.00	118,980,000.00	118,290,000.00	164.70	99.42	
1.1.4.1	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72,240,000.00	118,980,000.00	118,290,000.00	164.70	99.42	
1.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	131,916,000.00	123,216,000.00	106,306,166.00	93.40	86.28	
1.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,215,500.00	27,215,500.00	25,323,500.00	117.23	93.05	
1.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	91,995,000.00	76,295,000.00	63,032,666.00	82.93	82.62	
1.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16,705,500.00	19,705,500.00	17,950,000.00	117.96	91.09	
1.1.6	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	264,575,150.00	266,575,150.00	175,351,431.00	100.76	65.78	
1.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39,820,450.00	41,820,450.00	39,042,408.00	105.02	93.36	
1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180,254,700.00	180,254,700.00	91,809,023.00	100.00	50.93	
1.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	100.00	
1.1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	100.00	
2	Miningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	303,555,000.00	312,655,000.00	225,040,622.00	103.00	71.98	
2.1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD	45,600,000.00	45,600,000.00	44,674,000.00	100.00	97.97	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
2.2		Cakupan perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	32,915,000.00	32,915,000.00	32,915,000.00	100.00	100.00	
2.1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah program / kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	45,600,000.00	45,600,000.00	44,674,000.00	100.00	97.97	
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	11,320,000.00	11,320,000.00	11,180,000.00	100.00	98.76	
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	11,320,000.00	11,320,000.00	11,180,000.00	100.00	98.76	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
2.1.4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PD yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	11,380,000.00	11,380,000.00	11,057,000.00	100.00	97.16	
2.1.5	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah PD yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	11,580,000.00	11,580,000.00	11,257,000.00	100.00	97.21	
2.2.1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	24,115,000.00	24,115,000.00	24,115,000.00	100.00	100.00	
2.2.1.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	24,115,000.00	24,115,000.00	24,115,000.00	100.00	100.00	
2.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	100.00	
2.2.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	100.00	
2.3	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	225,040,000.00	234,140,000.00	147,451,622.00	104.04	62.98	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
2.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	50,945,000.00	59,645,000.00	59,283,500.00	117.08	99.39	
2.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	50,945,000.00	59,645,000.00	59,283,500.00	117.08	99.39	
2.3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan perempuan yang terlayani	129,585,000.00	127,985,000.00	44,991,122.00	98.77	35.15	
2.3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	129,585,000.00	127,985,000.00	44,991,122.00	98.77	35.15	
2.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	44,510,000.00	46,510,000.00	43,177,000.00	104.49	92.83	
2.3.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	44,510,000.00	46,510,000.00	43,177,000.00	104.49	92.83	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
3	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	3,058,218,000.00	3,161,788,000.00	2,732,271,700.00	103.39	86.42	
3.1	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Pemenuhan Indikator kualitas keluarga	58,750,000.00	137,320,000.00	131,471,850.00	233.74	95.74	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
3.1.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	50,460,000.00	129,030,000.00	123,181,850.00	255.71	95.47	
3.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PD yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	14,330,000.00	92,900,000.00	87,051,850.00	648.29	93.70	
3.1.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	23,350,000.00	23,350,000.00	23,350,000.00	100.00	100.00	
3.1.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	12,780,000.00	12,780,000.00	12,780,000.00	100.00	100.00	
3.1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	8,290,000.00	8,290,000.00	8,290,000.00	100.00	100.00	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.1.2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	8,290,000.00	8,290,000.00	8,290,000.00	100.00	100.00	
3.2	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Keluarga Pra Sejahtera	2,999,468,000.00	3,024,468,000.00	2,600,799,850.00	100.83	85.99	
3.2.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	529,868,000.00	554,868,000.00	426,339,850.00	104.72	76.84	
3.2.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69,875,000.00	69,875,000.00	45,133,500.00	100.00	64.59	
3.2.1.2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	68,768,000.00	68,768,000.00	11,047,300.00	100.00	16.06	
3.2.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	252,000,000.00	275,000,000.00	248,648,400.00	109.13	90.42	
3.2.1.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	78,755,000.00	78,755,000.00	74,660,750.00	100.00	94.80	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
3.2.1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	60,470,000.00	62,470,000.00	46,849,900.00	103.31	75.00	
3.2.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,469,600,000.00	2,469,600,000.00	2,174,460,000.00	100.00	88.05	
3.2.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,176,000,000.00	1,176,000,000.00	975,900,000.00	100.00	82.98	
3.2.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1,293,600,000.00	1,293,600,000.00	1,198,560,000.00	100.00	92.65	
4	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	391,453,000.00	470,493,000.00	354,622,346.00	120.19	75.37	
4.1	PENGLOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17,160,000.00	17,160,000.00	15,700,000.00	100.00	91.49	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
4.1.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Penginputan data sistem SIGA dan SIMPONI	17,160,000.00	17,160,000.00	15,700,000.00	100.00	91.49	
4.1.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	8,140,000.00	8,140,000.00	6,680,000.00	100.00	82.06	
4.1.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	9,020,000.00	9,020,000.00	9,020,000.00	100.00	100.00	
4.2	PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA	153,918,000.00	218,158,000.00	188,785,750.00	141.74	86.54	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
4.2.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	39,098,000.00	80,088,000.00	74,305,750.00	204.84	92.78	
4.2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	28,748,000.00	69,738,000.00	64,395,750.00	242.58	92.34	
4.2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	10,350,000.00	10,350,000.00	9,910,000.00	100.00	95.75	
4.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	114,820,000.00	138,070,000.00	114,480,000.00	120.25	82.91	
4.2.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	17,255,000.00	17,255,000.00	17,255,000.00	100.00	100.00	
4.2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	33,325,000.00	33,325,000.00	33,215,000.00	100.00	99.67	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
4.2.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	4,775,000.00	28,025,000.00	4,775,000.00	586.91	17.04	
4.2.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	59,465,000.00	59,465,000.00	59,235,000.00	100.00	99.61	
4.3	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan	220,375,000.00	235,175,000.00	150,136,596.00	106.72	63.84	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
4.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	51,545,000.00	51,545,000.00	47,519,400.00	100.00	92.19	
4.3.1.1	Advokasi dan pendampingan PD dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51,545,000.00	51,545,000.00	47,519,400.00	100.00	92.19	
4.3.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan anak yang terlayani	134,320,000.00	149,120,000.00	68,346,196.00	111.02	45.83	
4.3.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	15,720,000.00	15,720,000.00	2,880,000.00	100.00	18.32	
4.3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	118,600,000.00	133,400,000.00	65,466,196.00	112.48	49.08	
4.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	34,510,000.00	34,510,000.00	34,271,000.00	100.00	99.31	
4.3.3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	34,510,000.00	34,510,000.00	34,271,000.00	100.00	99.31	
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	6,645,158,000.00	6,693,858,000.00	5,684,024,420.00	100.73	84.91	
5.1	PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,556,378,000.00	1,558,378,000.00	1,500,758,660.00	100.13	96.30	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
5.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian kualitas penduduk	58,985,000.00	58,985,000.00	13,906,500.00	100.00	23.58	
5.1.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	45,955,000.00	45,955,000.00	1,777,000.00	100.00	3.87	
5.1.1.2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13,030,000.00	13,030,000.00	12,129,500.00	100.00	93.09	
5.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	1,497,393,000.00	1,499,393,000.00	1,486,852,160.00	100.13	99.16	
5.1.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63,275,000.00	63,275,000.00	62,002,500.00	100.00	97.99	
5.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	160,988,000.00	162,988,000.00	161,213,000.00	101.24	98.91	
5.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	1,255,177,910.00	100.00	99.62	
5.1.2.4	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	6,910,000.00	6,910,000.00	6,590,750.00	100.00	95.38	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
5.1.2.5	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	6,220,000.00	6,220,000.00	1,868,000.00	100.00	30.03	
5.2	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	3,084,216,000.00	3,118,216,000.00	2,539,848,960.00	101.10	81.45	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
5.3		Capaian Kinerja Pemakaian kontrasepsi Modern/MCPR	2,004,564,000.00	2,017,264,000.00	1,643,416,800.00	100.63	81.47	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan masyarakat yang terpapar Isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	2,045,467,000.00	2,079,467,000.00	1,722,530,260.00	101.66	82.84	
5.2.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	96,918,000.00	96,918,000.00	62,325,050.00	100.00	64.31	
5.2.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1,198,312,000.00	1,198,312,000.00	1,060,163,660.00	100.00	88.47	
5.2.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	352,867,000.00	352,867,000.00	207,781,300.00	100.00	58.88	
5.2.1.4	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148,730,000.00	148,730,000.00	134,702,000.00	100.00	90.57	
5.2.1.5	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	248,640,000.00	282,640,000.00	257,558,250.00	113.67	91.13	
5.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	499,290,000.00	499,290,000.00	492,915,000.00	100.00	98.72	
5.2.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	499,290,000.00	499,290,000.00	492,915,000.00	100.00	98.72	
5.3.1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	2,004,564,000.00	2,017,264,000.00	1,643,416,800.00	100.63	81.47	
5.3.1.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,902,000.00	56,602,000.00	24,514,000.00	123.31	43.31	
5.3.1.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,134,857,000.00	1,134,857,000.00	878,006,200.00	100.00	77.37	
5.3.1.3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	21,980,000.00	23,980,000.00	11,778,000.00	109.10	49.12	
5.3.1.4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	737,442,000.00	737,442,000.00	695,473,900.00	100.00	94.31	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Anggaran DPA (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% DPA / Renstra	Realisasi Alokasi	Pelaksana Program
5.3.1.5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27,958,000.00	27,958,000.00	27,217,700.00	100.00	97.35	
5.3.1.6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30,450,000.00	30,450,000.00	6,213,000.00	100.00	20.40	
5.3.1.7	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5,975,000.00	5,975,000.00	214,000.00	100.00	3.58	
5.2.3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	539,459,000.00	539,459,000.00	324,403,700.00	100.00	60.14	
5.2.3.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4,343,000.00	4,343,000.00	4,279,400.00	100.00	98.54	
5.2.3.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	535,116,000.00	535,116,000.00	320,124,300.00	100.00	59.82	

h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa	Kategori Nilai AKIP PD	BB	
1.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Nilai AKIP PD	73.39	
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	7	
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	1	
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	
1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	
1.1.1.7	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	4	
1.1.2	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	8	
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	
1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	
1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	538	
1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	
1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	
1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	
1.1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	
1.1.3	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang disusun	3	
1.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	
1.1.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	
1.1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	
1.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	
1.1.4	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	1	
1.1.4.1	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	
1.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	3	
1.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	
1.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	
1.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	
1.1.6	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	4	
1.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	
1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	
1.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
1.1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	
2	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	69.22	
2.1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD	56.36	
2.2		Cakupan perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	0.061	
2.1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah program / kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	31	
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	1	
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	1	
2.1.4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PD yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	40	
2.1.5	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah PD yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	40	
2.2.1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	90	
2.2.1.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	3	
2.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan	64	
2.2.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	4	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
2.3	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	5.70	
2.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	3	
2.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	3	
2.3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	
2.3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	6	
2.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	35	
2.3.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	65	
3	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	83.97	
3.1	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Pemenuhan Indikator kualitas keluarga	72	
3.1.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	3	
3.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PD yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	25	
3.1.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	4	
3.1.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
3.1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	1	
3.1.2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1	
3.2	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Keluarga Pra Sejahtera	22,983	
3.2.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22.50	
3.2.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	
3.2.1.2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	7	
3.2.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	26	
3.2.1.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20	
3.2.1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	20	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
3.2.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	392	
3.2.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10	
3.2.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	20,099	
4	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	775.46	
4.1	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	
4.1.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Penginputan data sistem SIGA dan SIMPONI	100	
4.1.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	12	
4.1.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	2	
4.2	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA	77.55	
4.2.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	3	
4.2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20	
4.2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1	
4.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	3	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
4.2.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	100	
4.2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1	
4.2.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	2	
4.2.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	3	
4.3	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan	0.014	
4.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	3	
4.3.1.1	Advokasi dan pendampingan PD dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	120	
4.3.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan anak yang terlayani	100	
4.3.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20	
4.3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20	
4.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	6	
4.3.3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2	
5.1	PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	
5.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian kualitas penduduk	2	
5.1.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	1	
5.1.1.2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	
5.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	5	
5.1.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	
5.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	
5.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	
5.1.2.4	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	71	
5.1.2.5	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1	
5.2	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	9.02	
5.3		Capaian Kinerja Pemakaian kontrasepsi Modern/MCPR	66.21	
5.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	94.63	
5.2.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2	
5.2.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
5.2.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6	
5.2.1.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	
5.2.1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15	
5.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	39.39	
5.2.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	960	
5.3.1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	
5.3.1.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	
5.3.1.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2,305	
5.3.1.3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	
5.3.1.4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	59	
5.3.1.5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	
5.3.1.6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	
5.3.1.7	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0	

No	Indikator Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Keterangan
5.2.3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	34	
5.2.3.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	
5.2.3.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2024. Hasil pengukuran kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 masuk dalam kategori berhasil.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan akan dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, adapun beberapa upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atau reviu berkala atas target kinerja secara berjenjang
2. Dalam upaya menurunnya angka kelahiran total (TFR), akan mengoptimalkan kinerja penyuluh keluarga berencana (PKB) dalam melakukan penyuluhan program dan pemenuhan target pelayanan KB
3. Terhadap target kinerja yang belum tercapai akan dilakukan evaluasi terhadap target
4. Koordinasi dan advokasi kepada steakholder terkait sebagai upaya untuk pemenuhan atau pencapaian target

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini dengan lebih gemilang yang berkeadaban.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsis dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Juni 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SUMBAWA,



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab Data	Sumber Data
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	$TFR = \frac{1}{1.000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 \right] ASFR_i$	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	DP2KBP3A/BK KBN
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari segi ekonomi social dan budaya	$\text{Persentase Keluarga Sejahtera} = \frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga (KK)}} \times 100$	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendataan Keluarga
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah	Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai = 90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80, Predikat B (Baik) - Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60	Sekretariat	Inspektorat
4	Miningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda.	$\text{Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD} = \frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD}} \times 100$	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	DP2KBP3A
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan	Komponen yang dinilai, yaitu 1. Kelembagaan (16,40%) dengan nilai maksimal 164 Poin, 2. Hak Sipil dan Kebebasan (11,50%) dengan nilai maksimal 115 Poin, 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (15,60%) dengan nilai maksimal 156 Poin, 4. Kesehatan dan Kesejahteraan (15,00%) dengan nilai maksimal 150 Poin, 5. Pendidikan, Pemfaatan Waktu Luang (11,00%) dengan nilai maksimal 110 Poin, 6. Perlindungan Khusus (20,50%) dengan nilai maksimal 205 Poin, 7. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Keluarahan (10,00%) dengan nilai maksimal 100 Poin	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kementerian PPA



Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa

IAN NATULEALA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JANNATULFALA, S.AP

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Drs. H. Mahmud Abdullah

Jabatan : Bupati Sumbawa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Sumbawa

Drs. H. Mahmud Abdullah

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama
Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa

JANNATULFALA, S.AP
NIP. 19640719 198503 2 005

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	Persen	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	Persen	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000
					Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	Kategori	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	Persen	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000
					Program Perlindungan Perempuan	234.140.000
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	Nilai	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000
					Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000
JUMLAH						19.357.603.810



Pihak Pertama
 Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa

JANNATULFALA, S.AP
 NIP. 19640719 198503 2 005

CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisai	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,30	10,83	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	281.187.380	18,04
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	177.084.000	3,45
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	0,00	0,00	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	2.850.000	0,09
						Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000		-
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.062.150.338	23,65
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	0,00	0,00	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000		-
						Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	7.140.000	3,05
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	0,00	0,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000		-
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	17.000.000	7,79
						Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000		-
JUMLAH							19.357.603.810	2.547.411.718	13,16



Sumbawa, 8 April 2024
 Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa

ANGGA ULFALA, S.AP
 NIP. 19640719 198503 2 005

CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisai	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,38	13,72	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	316.673.240	20,32
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	1.203.414.960	23,43
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	0,00	0,00	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	258.780.000	8,56
						Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	24.050.000	17,51
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.431.927.398	27,89
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	23,07	177,49	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	14.350.000	18,28
						Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	14.735.000	6,29
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	0,00	0,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000		-
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000		-
						Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	28.804.000	12,25
JUMLAH							19.357.603.810	4.292.734.598	22,18



Sumbawa, 11 Juli 2024
 Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa
INTJULFALA, S.AP
 NIP. 19640719 198503 2 005

CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisai	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,85	30,69	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	193.164.360	12,40
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	1.237.932.300	24,11
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	0,00	0,00	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	34.971.900	1,16
						Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	14.500.000	10,56
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.060.799.897	23,64
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	23,07	177,49	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	25.170.000	32,06
						Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	35.735.489	15,26
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	775,46	109,68	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	2.780.000	16,20
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	68.585.000	31,44
						Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	36.551.040	15,54
Jumlah							19.357.603.810	3.710.189.986	19,17



Sumbawa Besar, 8 Oktober 2024
 Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa

IKETUT SUMADI ARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094

CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisai	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,92	33,32	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	709.733.680	45,54
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	1.564.834.500	30,47
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	83,97	95,42	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	2.304.197.950	76,19
						Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	92.921.850	67,67
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	1.936.263.006	22,21
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	23,07	177,49	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	38.069.000	48,49
						Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	89.841.133	38,37
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	0,00	0,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	12.920.000	75,29
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	103.200.750	47,31
						Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	84.781.556	36,05
Jumlah							19.357.603.810	6.936.763.425	35,83

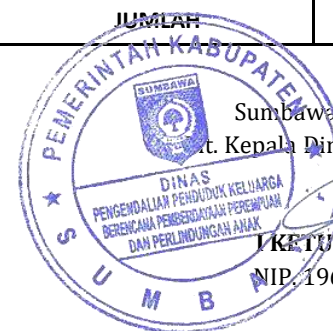


Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
 Plt. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa

1 KETUT SUMADI ARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094

REKAITULASI CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisai	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	2,45	112,92	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	1.500.758.660	96,30
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	4.183.265.760	81,46
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	83,97	95,42	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	2.600.799.850	85,99
						Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	131.471.850	95,74
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	8.491.140.639	97,39
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	69,22	532,46	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	77.589.000	98,82
						Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	147.451.622	62,98
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	775,46	109,68	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	15.700.000	91,49
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	188.785.750	86,54
						Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	150.136.596	63,84
Jumlah							19.357.603.810	17.487.099.727	90,34



Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
 t. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa

KEKUT SUMADI ARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Tati Haryati, S.Psi
Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Jannatulfala, S.AP
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas



Jannatulfala, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

Tati Haryati, S.Psi

NIP. 19770515 200501 2 020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran
1.	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	5,2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000
2.	Meningkatnya persentase Pemenuhan Indikator KLA	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA	70,07	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	218.158.000
3.	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap anak	Cakupan Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan	0,028	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.175.000



Pihak Kedua

Kepala Dinas

Ida Nur Hafala, S.AP

NIP. 19640119 198503 2 005

Pihak Pertama

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

Tati Haryati, S.Psi

NIP. 19770515 200501 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Anggraini, S.AP

Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Jannatulfala, S.AP

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama

Kabid Pengendalian Penduduk
Advokasi dan Penggerakan

Anggraini, S.AP

NIP. 19760306 200701 2 014

Pihak Kedua

Kepala Dinas



Jannatulfala, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,84	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000
2.	Menurunnya angka kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	13,9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.118.216.000



Pihak Kedua
Kepala Dinas

Indira Alfala, S.AP
NIP. 19640719 198503 2 005

Pihak Pertama
Kabid Pengendalian Penduduk
Advokasi dan Penggerakan

Anggraini, S.AP
NIP. 19760306 200701 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Nurfaridah, S.Kom,MM

Jabatan : Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Jannatulfala, S.AP

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Kepala Dinas

Jannatulfala, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama

Kabid Kesetaraan Gender dan
Peningkatan Kualitas Keluarga

Nurfaridah, S.Kom,MM

NIP. 19730821 199902 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	Cakupan PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD	54,57	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	45.600.000
2.	Meningkatnya jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	Cakupan perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	0,062	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	32.915.000
3.	Meningkatnya pemenuhan indikator kualitas keluarga	Tingkat Pemenuhan Indikator kualitas keluarga	80	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000
4.	Terlaksananya pengelolaan sistem data gender dan anak	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000



Pihak Kedua
 Kepala Dinas

Arnatul Fala, S.AP
 NIP. 19640719 198503 2 005

Pihak Pertama
 Kabid Kesetaraan Gender dan
 Peningkatan Kualitas Keluarga

Nurfaridah, S.Kom,MM
 NIP. 19730821 199902 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : A.A.NGR. Ketut Riyadi, S.KM, M.Kes

Jabatan : Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Jannatulfala, S.AP

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas



Jannatulfala, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama

Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

A.A.NGR. Ketut Riyadi, S.KM, M.Kes

NIP. 19690719 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran
1.	Menurunnya Angka Keluarga Pra Sejahtera	Angka Keluarga Pra Sejahtera	19.179	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.024.468.000
2.	Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Capaian Kinerja Pemakaian kontrasepsi Modern/MCPR	64	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.017.264.000



Pihak Kedua
Kepala Dinas

Armanul Fala, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Pihak Pertama
Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

A.A.NGR. Ketut Riyadi, S.KM, M.Kes

NIP. 19690719 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Anggraini, S.AP

Jabatan : Plt. Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Jannatulfala, S.AP

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Kepala Dinas

Jannatulfala, S.AP

NIP. 196407191985032005

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Anggraini, S.AP

NIP. 197603062007012014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas P2Kbp3A	Peningkatan Nilai Akip Dinas P2KBP3A	75,49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810

Pihak Kedua

Kepala Dinas



Anggraini, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Anggraini, S.AP

NIP. 19760306 200701 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Durian Nomor 75 Telp. 0371-21798 - Sumbawa Besar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dra. R Siti Peny Aisyah

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Anggraini, S.AP

Jabatan : Plt. Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sekretaris

Anggraini, S.AP

NIP. 19760306 200701 2 014

Sumbawa Besar,

Pihak Pertama

Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian

Dra. R Siti Peny Aisyah

NIP. 19670308 199403 2 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Tersusunnya Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.182.250
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000
	Tersusunnya Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		118.980.000
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000
	Tersusunnya Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		123.216.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500
	Tersusunnya Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		266.575.150
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000

Pihak Kedua

Sekretaris

Anggraini, S.AP

NIP. 19760306 200701 2 014

Pihak Pertama

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dra. R Siti Peny Aisyah

NIP. 19670308 199403 2 012

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707,00

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	
3	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	
4	Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	
6	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	
7	Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	
10	Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	
	J U M L A H	19.357.603.810	

Sumbawa Besar, Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa



Jahyatulfala, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN KE I
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENDANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan Ke I	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,30	10,83
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	0,00	0,00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0,00
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	0,00	0,00
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707,00	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Triwulan Ke I	
			Realisasi	%
a	b	c	d	e
1	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	281.187.380	18,04
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	177.084.000	3,45
3	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	2.850.000	0,09
4	Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	-	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.062.150.338	23,65
6	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	-	-
7	Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	7.140.000	3,05
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	-	-
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	17.000.000	7,79
10	Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	-	-
TOTAL		19.357.603.810	2.547.411.718	13,16



Sumbawa Besar, 8 April 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa

Jaini, Iulfaia, S.AP

N.P. 19670719 198503 2 005

CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN KE II
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENDANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan Ke II	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,38	13,72
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88	0,00	0,00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	103,89
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13	23,07	177,49
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Triwulan Ke II	
			Realisasi	%
a	b	c	d	e
1	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	316.673.240	20,32
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	1.203.414.960	23,43
3	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	258.780.000	8,56
4	Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	24.050.000	17,51
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.431.927.398	27,89
6	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	14.350.000	18,28
7	Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	14.735.000	6,29
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	-	-
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	-	-
10	Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	28.804.000	12,25
TOTAL		19.357.603.810	4.292.734.598	22,18

Sumbawa Besar, 11 Juli 2024
 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumbawa

 **Jaini, Irfala, S.AP**
 NIP. 19640719 198503 2 005

CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN KE III
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENDANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan Ke III	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,85	30,69
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88	0,00	0,00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	BB	100
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13	23,07	177,49
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	775,46	109,68

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Triwulan Ke III	
			Realisasi	%
a	b	c	d	e
1	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	193.164.360	12,40
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	1.237.932.300	24,11
3	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	34.971.900	1,16
4	Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	14.500.000	10,56
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.060.799.897	23,64
6	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	25.170.000	32,06
7	Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	35.735.489	15,26
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	2.780.000	16,20
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	68.585.000	31,44
10	Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	36.551.040	15,54
TOTAL		19.357.603.810	3.710.189.986	19,17



Sumbawa Besar, 8 Oktober 2024
 Rt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumbawa

I KETUT SUMADI ARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094

CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TRIWULAN KE IV
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENDANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan Ke IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,92	33,32
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88	83,97	95,42
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0.00
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13	23,07	177,49
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Triwulan Ke IV	
			Realisasi	%
a	b	c	d	e
1	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	709.733.680	45,54
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	1.564.834.500	30,47
3	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	2.304.197.950	76,19
4	Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	92.921.850	67,67
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	1.936.263.006	22,21
6	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	38.069.000	48,49
7	Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	89.841.133	38,37
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	12.920.000	75,29
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	103.200.750	47,31
10	Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	84.781.556	36,05
TOTAL		19.357.603.810	6.936.763.425	35,83



Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
 Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumbawa

I KETUT SUMADI ARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi	%
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,30	10,83	0,38	13,72	0,85	30,69	0,92	33,32	2,45	112,92
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	3031,27	83,97	95,42
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0,00	0,00	103,89	BB	100	0,00	0	BB	100
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	0,00	0,00	23,07	832,97	23,07	832,97	23,07	832,97	69,22	532,5
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,46	27994,95	0,00	0,00	775,46	109,7

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi	%
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
1	Program Pengendalian Penduduk	1.558.378.000	281.187.380	18,04	316.673.240	20,32	193.164.360	12,40	709.733.680	45,54	1.500.758.660	96,3
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.135.480.000	177.084.000	18,04	1.203.414.960	20,32	1.237.932.300	12,40	1.564.834.500	45,54	4.183.265.760	81,5
3	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.468.000	2.850.000	18,04	258.780.000	20,32	34.971.900	12,40	2.304.197.950	45,54	2.600.799.850	86,0
4	Program peningkatan Kualitas Keluarga	137.320.000	-	18,04	24.050.000	20,32	14.500.000	12,40	92.921.850	45,54	131.471.850	95,7
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.718.809.810	2.062.150.338	18,04	2.431.927.398	20,32	2.060.799.897	12,40	1.936.263.006	45,54	8.491.140.639	97,4
6	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	78.515.000	-	18,04	14.350.000	20,32	25.170.000	12,40	38.069.000	45,54	77.589.000	98,8
7	Program Perlindungan Perempuan	234.140.000	7.140.000	18,04	14.735.000	20,32	35.735.489	12,40	89.841.133	45,54	147.451.622	63,0
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.160.000	-	18,04	-	20,32	2.780.000	12,40	12.920.000	45,54	15.700.000	91,5
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	218.158.000	17.000.000	18,04	-	20,32	68.585.000	12,40	103.200.750	45,54	188.785.750	86,5
10	Program Perlindungan Khusus Anak	235.175.000	-	18,04	28.804.000	20,32	36.551.040	12,40	84.781.556	45,54	150.136.596	63,8
TOTAL		19.357.603.810	2.547.411.718	13,16	4.292.734.598	22,18	3.710.189.986	19,17	6.936.763.425	35,83	17.487.099.727	90,34

Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
 Dit. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumbawa



/KEKUT/ SUMADI ARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab	
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan					Rp.	APBD					
					Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan											
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,77	0,69	0,69	0,69	0,69							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	354.212.500	409.936.500	363.787.500	430.441.500		
															Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	58.985.000	3.860.000	13.500.000	10.800.000	30.825.000	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	
									Pengadaan ATK	1 Paket	x				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	45.955.000	730.000	8.400.000	8.400.000	28.425.000		
								Penyusunan dokumen GDPK	1 Dokumen			x	x									
								Rapat Konsultasi dokumen GDPK	3 kali					x								
								Uji Publik dokumen GDPK	2 kali					x								
								Cetak dkumen GDPK	10 buku					x								
								Pengadaan ATK	1 Paket		x				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	3.130.000	5.100.000	2.400.000	2.400.000		
								Rapat koordinasi pemutahiran data keluarga	3 kali			x	x	x								
															Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.499.393.000	350.352.500	396.436.500	352.987.500	399.616.500	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	
									Pengadaan ATK	1 Paket		x				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	16.722.500	14.467.500	14.467.500		17.617.500
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 kali		x	x	x	x								
								Pengadaan ATK	1 Paket		x											
									Register dan registrasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan	12 kali		x	x	x	x	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	162.988.000	16.330.000	65.529.000	15.600.000		65.529.000
								Pemutakhiran data oleh PPKBD dan Sub PPKBD	2 kali			x		x								
								Pengolahan data di balai penyuluhan/UPT KB	12 kali		x	x	x	x								
									Pengadaan ATK	1 Paket		x				Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	6.910.000	430.000	-	6.480.000		-
								Pengadaan ATK	1 Paket		x											
								Pembinaan pencatatan dan pelporan program	3 kali			x	x	x								
															PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	678.529.950	1.620.830.800	1.682.774.650	1.153.344.600		
															Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.079.467.000	310.319.000	496.513.000	779.205.000	493.430.000		
									Pengadaan ATK	1 Paket		x			Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	14.098.000	32.468.000	38.316.000	12.036.000		
								Identifikasi dan seleksi kasus	2 kali			x	x									
								Diseminasi Audit Kasus Stunting	2 kali			x	x									
									Evaluasi Audit Kasus Stunting	2 kali				x	x							

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab	
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja					Rp.	APBD					
					Per Triwulan						Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan					
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
									Pengadaan ATK	1 Paket	x					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.198.312.000	163.312.000	215.464.000	445.328.000	374.208.000	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penyuluhan program dan pembinaan lini lapangan	10 kali			x	x	x								
								Pembayaran jasa air dan listrik balai	12 kali	x		x	x	x								
									Pengadaan ATK	1 Paket	x					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	352.867.000	70.959.000	105.696.000	105.696.000	70.516.000	
								Mini lokakarya Kecamatan	10 kali	x	x	x	x									
								Cetak KIE	4 dokumen		x	x										
									Promosi KIE lewat media massa	4 kali		x	x	x		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148.730.000	130.000	43.600.000	95.000.000	10.000.000	
								Koordinasi TPPS Kabupaten														
								Evaluasi rencana aksi percepatan penurunan stunting														
																Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	61.820.000	99.285.000	94.865.000	26.670.000	
									Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	10 kali	x	x	x	x		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	499.290.000	49.929.000	99.858.000	249.645.000	99.858.000	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
																Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.017.264.000	264.763.350	911.572.600	386.058.650	454.869.400	
									Distribusi alat obat kontrasepsi ke faskes	7 kali	x	x	x	x								
									Pelayanan KB IUD	655 orang	x	x	x	x								
									Pelayanan KB Implant	2396 orang	x	x	x	x		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1.134.857.000	234.571.350	131.072.600	336.358.650	432.854.400	
									Pelayanan KB MOW	35 orang	x	x	x	x								
									Pelayanan KB MOP	5 Orang	x	x	x	x								
									Pelayanan KB Cabut Implant	170 orang	x	x	x	x		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	3.430.000	3.000.000	13.500.000	4.050.000	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
									Pengadaan IUD Kit	25 Unit		x										
									Pengadaan Implant Removal Kit	36 Unit		x										
									Koordinasi pelayanan KB di Fasilitas kesehatan	3 kali		x	x		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	9.606.000	9.176.000	9.176.000	-		
									Pembinaan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	3 kali		x	x									
									Pelayanan KB pada momentum	2 kali		x	x									
									Sosialisasi kesertaan KB pria	4 kali		x	x	x	Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.975.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.655.000		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja					Rp.	APBD				
					Per Triwulan						Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	539.459.000	53.518.600	112.887.200	267.866.000	105.187.200	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
									Penguatan Kampung KB	1 kali		x			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	495.000	-	3.848.000	-	
									Pembekalan POKJA kampung KB	1 kali		x			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	535.116.000	53.023.600	112.887.200	264.018.000	105.187.200	
									Pertemuan POKJA Kampung KB tingkat desa	6 kali		x	x	x							
II	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88,00					88,00						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	304.146.000	595.032.000	1.091.808.000	1.033.482.000	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
															Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	554.868.000	57.186.000	348.072.000	103.968.000	45.642.000	
									Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	24 kecamatan	x	x	x	x	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	18.930.000	24.860.000	24.860.000	1.225.000	
									Sosialisasi dan konseling PPKS	8 kali		x	x	x	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	68.768.000	8.596.000	17.192.000	25.788.000	17.192.000	
									Pengadaan BKB Kit Stunting	21 Unit		x			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	275.000.000	-	252.000.000	-	23.000.000	
									Pembinaan dan pelatihan POKTAN	24 kecamatan	x	x	x	x	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	78.755.000	20.410.000	28.560.000	28.560.000	1.225.000	
									Pembinaan POKTAN yang ikut dalam lomba tingkat provinsi dan nasional	3 POKTAN	x				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	62.470.000	9.250.000	25.460.000	24.760.000	3.000.000	
															Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	246.960.000	246.960.000	987.840.000	987.840.000	
									Pencatatan hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	x	x	x	x	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	117.600.000	117.600.000	470.400.000	470.400.000	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
									Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	x	x	x	x	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.293.600.000	129.360.000	129.360.000	517.440.000	517.440.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja					Rp.	APBD				
					Per Triwulan						Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	1.890.000	26.990.000	6.180.000	102.260.000	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
															Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.030.000	1.160.000	24.610.000	4.080.000	99.180.000	
									Rapat Koordinasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	3 kali		x	x	x	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.900.000	730.000	8.100.000	3.100.000	80.970.000	
									Cetak KIE Kesetaraan Gender	4 dokumen		x			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.350.000	-	11.350.000	-	12.000.000	
									Sosialisasi KIE Kesetaraan Gender melalui media massa	6 kali	x	x	x	x							
									Dialog Warga pencegahan perkawinan usia anak	2 kali			x	x	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.780.000	430.000	5.160.000	980.000	6.210.000	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
															Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	8.290.000	730.000	2.380.000	2.100.000	3.080.000	
									Sosialisasi peningkatan peran puspaga	2 kali		x	x		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	730.000	2.380.000	2.100.000	3.080.000	
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB		BB									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	2.489.515.926	2.511.403.528	2.903.151.598	814.738.758	Sekretaris
															Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.428.599	23.457.560	10.881.200	66.530.280	5.559.559	
									Penyusunan Renja	1 Dokumen		x	x		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.375.200	12.962.000	3.206.200	11.207.000	-	
									Penyusunan RKA	1 Dokumen	x	x	x		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.136.280	1.966.280	-	1.170.000	-	
									Penyusunan RKA Perubahan	1 Dokumen				x	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.641.280	-	-	-	1.641.280	
									Penyusunan DPA	1 Dokumen	x				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.881.280	1.881.280	-	-	-	
									Penyusunan DPA Perubahan	1 Dokumen				x	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.641.280	-	-	-	1.641.280	
									Penyusunan Laporan relaisasi capaian kinerja per bulan/triwulan	4 dokumen		x	x	x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	1.128.000	-	3.176.280	-	
									Penyusunan LKJIP	1 Dokumen			x	x	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.448.999	5.520.000	7.675.000	50.977.000	2.276.999	
									Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen			x	x							
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	2.312.935.742	2.243.194.720	2.644.684.210	765.613.139	
									Pembayan gaji pegawai	12 kali	x	x	x	x	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	2.280.645.542	2.221.334.720	2.623.864.010	740.756.739	
									Pembayaran honorarium PPK Keu, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Pembantu Bendahara	12 kali	x	x	x	x	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	22.460.000	20.460.000	20.460.000	20.460.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja					Rp.	APBD				
					Per Triwulan						Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									Pelaksanaan penatausahaan keuangan	1 Dokumen	x				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	4.740.000	-	-	-	Sekretaris
									Koordinasi pelaksanaan akuntansi	1 Dokumen		x			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	1.140.000	1.400.000	-	-	
									Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen				x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	-	-	-	2.256.200	
									Penyusunan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen		x			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000	2.730.000	-	-	-	
									Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	3 Dokumen				x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.940.600	1.220.200	-	360.200	360.200	
									Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen				x	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	-	-	-	1.780.000	
															Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	42.855.404	42.855.393	42.855.393	8.616.060	Sekretaris
									Pengadaan alat listrik	1 Paket				x	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250	6.214.064	6.214.062	6.214.062	6.214.062	
									Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan	12 kali	x	x	x	x	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
									Penyediaan jamuan tamu	12 kali	x	x	x	x	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	1.802.006	1.801.998	1.801.998	1.801.998	
									Pelaksanaan rapat koordinasi dengan steak holder	14 kali	x	x	x	x	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	34.239.334	34.239.333	34.239.333	-	
															Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.980.000	-	72.240.000	46.740.000	-	Sekretaris
									Pengadaan sarana pendukung kantor (laptop dan printer)	11 unit		x	x		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000	-	72.240.000	46.740.000	-	
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	34.925.500	30.390.500	25.950.000	31.950.000	Sekretaris
									Pencatatan agenda surat masuk dan keluar	12 kali	x	x	x	x	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	7.280.500	7.935.000	6.000.000	6.000.000	
									Pembayaran tagihan listrik dan air serta wifi	12 kali	x	x	x	x	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000	23.145.000	16.250.000	15.450.000	21.450.000	
									penyediaan alat-alat kebersihan	1 Paket	x				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500	4.500.000	6.205.500	4.500.000	4.500.000	
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	75.341.720	111.841.715	76.391.715	3.000.000	Sekretaris
									Pelaksanaan pemeliharaan mobil kepala dinas	12 kali	x	x	x	x	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450	12.440.150	13.940.150	12.440.150	3.000.000	
									Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan oprasinal	12 kali		x	x		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700	59.734.902	59.734.899	60.784.899	-	
									Pelaksanaan pemeliharaan AC dan Komputer	14 unit			x		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	3.166.668	3.166.666	3.166.666	-	
									Rehab Sekretariat FAS	1 Paket		x			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	-	35.000.000	-	-	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja					Rp.	APBD				
					Per Triwulan						Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IV	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13,00	3,25	3,25	3,25	3,25							PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	2.405.000	33.630.000	23.440.000	19.040.000	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
															Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	1.460.000	16.290.000	14.900.000	12.950.000	
									Koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 kali			x		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.320.000	730.000	8.670.000	1.920.000	-	
									Koordinasi pelaksanaan PUG	2 kali			x	x	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.320.000	730.000	7.620.000	1.920.000	1.050.000	
									Pendampingan pelaksanaan penyusunan ARG	1 kali				x	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.380.000	-	-	8.850.000	2.530.000	
									Sosialisasi penyusunan ARG	1 kali				x	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.580.000	-	-	2.210.000	9.370.000	
															Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000	945.000	8.540.000	8.540.000	6.090.000	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
									Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi	3 Dokumen	x	x	x	x	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.115.000	945.000	8.540.000	8.540.000	6.090.000	
															Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	8.800.000	-	-	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
									Pengadaan / Cetak KIE pemberdayaan perempuan	3 Dokumen		x			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	8.800.000	-	-	
															PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	46.859.575	70.182.550	67.854.175	49.243.700	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
															Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	7.635.000	21.690.000	14.880.000	15.440.000	
									Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP	3 kali		x	x	x	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	7.635.000	21.690.000	14.880.000	15.440.000	
									Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP	1 kali		x									
									KIE Pencegahan KTP	3 Dokumen		x									
															Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	28.664.575	36.292.550	37.674.175	25.353.700	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
									Penangan/pelayanan kepada korb a kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	x	x	x	x	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	28.664.575	36.292.550	37.674.175	25.353.700	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab
																APBD					
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan					Rp.	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.510.000	10.560.000	12.200.000	15.300.000	8.450.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
									Pengadaan ATK	1 Paket	x				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	46.510.000	10.560.000	12.200.000	15.300.000	8.450.000	
									Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali		x		x	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						
									Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali			x	x							
V	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	%	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000	560.000	5.680.000	980.000	9.940.000	
															Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.160.000	560.000	5.680.000	980.000	9.940.000	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
									Pengumpulan data gender dan anak	2 dokumen			x	x	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.140.000	430.000	5.680.000	980.000	1.050.000	
									Penyusunan profil data gender dan anak	2 dokumen				x	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.020.000	130.000	-	-	8.890.000	
															PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	218.158.000	24.115.000	53.788.000	56.190.000	84.065.000	
															Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.088.000	5.760.000	27.618.000	5.720.000	40.990.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
									Rapat Koordinasi gugus tugas KLA	2 kali			x	x	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.738.000	3.890.000	20.578.000	4.280.000	40.990.000	
									Rapat Evaluasi KLA	3 kali			x	x						-	
									Rapat koordinasi pelembagaan pemenuhan hak anak	3 kali			x		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.350.000	1.870.000	7.040.000	1.440.000		
															Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	138.070.000	18.355.000	26.170.000	50.470.000	43.075.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
									Sosialisasi penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	2 kali			x		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.000	280.000	875.000	16.100.000	-	
									Temu anak samawa	1 kali			x		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.325.000	880.000	20.520.000	10.700.000	1.225.000	
									Pengadaan KIE pemenuhan hak anak	2 dokumen				x	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.025.000	-	4.775.000	-	23.250.000	
									Musrenbang Anak	1 kali	x										
									Pembentukan forum anak kecamatan	2 kali	x			x	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.465.000	17.195.000	-	23.670.000	18.600.000	
									pembinaan forum anak	1 kali				x							

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja													Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan				Aktivitas Utama	target tahunan	Rencana Aksi Kinerja Per Triwulan					Rp.	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					Per Triwulan						Per Triwulan						Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Anggaran Per Triwulan				
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.175.000	50.799.200	73.158.300	46.165.000	65.052.500	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
															Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.545.000	8.235.000	20.430.000	7.440.000	15.440.000	
									Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA	3 kali		x	x	x	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.545.000	8.235.000	20.430.000	7.440.000	15.440.000	
									Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTA	1 kali		x									
									KIE Pencegahan KTA	3 Dokumen		x									
															Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.120.000	34.354.200	43.553.300	28.350.000	42.862.500	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
									Pembinaan anggota PATBM	2 kali		x		x	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.720.000	1.840.000	1.380.000	-	12.500.000	
									Penangan/pelayanan kepada korba kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	x	x	x	x	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	133.400.000	32.514.200	42.173.300	28.350.000	30.362.500	
															Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	8.210.000	9.175.000	10.375.000	6.750.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
									Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali		x	x		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000	8.210.000	9.175.000	10.375.000	6.750.000	
									Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali		x	x								



Sumbawa, 15 Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa
J. X. FALA, S.Pd
NIP. 19611719 198503 2 005

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
I	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,77	0,69	0,61	88,56						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	354.212.500	281.187.380	79,38	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
													Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	58.985.000	3.860.000	1.740.000	45,08	
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	45.955.000	730.000	-	0,00	
								Penyusunan dokumen GDPK	1 Dokumen			0						
								Rapat Konsultasi dokumen GDPK	3 kali			0						
								Uji Publik dokumen GDPK	2 kali			0						
								Cetak dkumen GDPK	10 buku			0						
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	3.130.000	1.740.000	55,59	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Rapat koordinasi pemutahiran data keluarga	3 kali			0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.499.393.000	350.352.500	279.447.380	79,76	
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	16.722.500	-	0,00	
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 kali	1	1	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	162.988.000	16.330.000	2.850.000	17,45	
								Register dan registrasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan	12 kali	3	1	33						
								Pemutakhiran data oleh PPKBD dan Sub PPKBD	2 kali			0						
								Pengolahan data di balai penyuluhan/UPT KB	12 kali	3	3	100	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	315.000.000	276.597.380	87,81	
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	6.910.000	430.000	-	0,00	
								Sosialisasi pembentukan rumah data ku	3 kali			0						
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	6.220.000	1.870.000	-	0,00	
								Pembinaan pencatatan dan pelporan program	3 kali			0						
													PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	678.529.950	177.084.000	26,10	
													Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.079.467.000	310.319.000	128.952.000	41,55	
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	14.098.000	-	0,00	
								Identifikasi dan seleksi kasus	2 kali			0						
								Diseminasi Audit Kasus Stunting	2 kali			0						
								Evaluasi Audit Kasus Stunting	2 kali			0						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.198.312.000	163.312.000	93.720.000	57,39	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penyuluhan program dan pembinaan lini lapangan	10 kali			0						
								Pembayaran jasa air dan listrik balai	12 kali	3	3	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.867.000	70.959.000	35.232.000	49,65	
								Mini lokakarya Kecamatan	10 kali	2	1	50						
								Cetak KIE	4 dokumen			0						
								Promosi KIE lewat media massa	4 kali			0	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148.730.000	130.000	-	0,00	
								Koordinasi TPPS Kabupaten				0						
								Evaluasi rencana aksi percepatan penurunan stunting				0						
													Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	499.290.000	49.929.000	-	0,00	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	10 kali	1		0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	499.290.000	49.929.000	-	0,00	
													Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	2.017.264.000	264.763.350	5.700.000	2,15	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Distribusi alat obat kontrasepsi ke faskes	7 kali	1	1	100	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	10.486.000	2.850.000	27,18	
								Pelayanan KB IUD	655 orang	1		0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1.134.857.000	234.571.350	-	0,00	
								Pelayanan KB Implant	2396 orang	1		0						
								Pelayanan KB MOW	35 orang	1		0						
								Pelayanan KB MOP	5 Orang	1		0						
								Pelayanan KB Cabut Implant	170 orang	1		0						
								Pembayaran kompensasi kegagalan penggunaan alokon	7 kali	1	1	100	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	3.430.000	2.850.000	83,09	
								Pengadaan IUD Kit	25 Unit			0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	-	-	0,00	
								Pengadaan Implant Removal Kit	36 Unit			0						
								Koordinasi pelayanan KB di Fasilitas kesehatan	3 kali			0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	9.606.000	-	0,00	
								Pembinaan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	3 kali			0						
								Pelayanan KB pada momentum	2 kali			0	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	5.230.000	-	0,00	
								Sosialisasi kesertaan KB pria	4 kali			0	Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.975.000	1.440.000	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	539.459.000	53.518.600	42.432.000	79,28	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penguatan Kampung KB	1 kali			0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	495.000	-	0,00	
								Pembekalan POKJA kampung KB	1 kali			0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	535.116.000	53.023.600	42.432.000	80,02	
								Pertemuan POKJA Kampung KB tingkat desa	6 kali		1	0						
II	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88,00	21,75		0,00						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	304.146.000	2.850.000	0,94	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
													Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	554.868.000	57.186.000	2.850.000	4,98	
								Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	24 kecamatan	6		0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	18.930.000	-	0,00	
								Sosialisasi dan konseling PPKS	8 kali			0	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	68.768.000	8.596.000	-	0,00	
								Pengadaan BKB Kit Stunting	21 Unit			0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	275.000.000	-	-	0,00	
								Pembinaan dan pelatihan POKTAN	24 kecamatan	6		0	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	78.755.000	20.410.000	-	0,00	
								Pembinaan POKTAN yang ikut dalam lomba tingkat provinsi dan nasional	3 POKTAN	1	1	100	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	62.470.000	9.250.000	2.850.000	30,81	
													Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	246.960.000	-	0,00	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Pencatatan hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	1		0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	117.600.000	-	0,00	
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	1		0	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.293.600.000	129.360.000	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	1.890.000	-	0,00	
													Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.030.000	1.160.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Rapat Koordinasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	3 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.900.000	730.000	-	0,00	
								Cetak KIE Kesetaraan Gender	4 dokumen			0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.350.000	-	-	0,00	
								Sosialisasi KIE Kesetaraan Gender melalui media massa	6 kali	1	1	100					0,00	
								Dialog Warga pencegahan perkawinan usia anak	2 kali			0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.780.000	430.000	-	0,00	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	8.290.000	730.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Sosialisasi peningkatan peran puspaga	2 kali			0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	730.000	-	0,00	
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB			0,00						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	2.489.515.926	2.062.150.338	82,83	
													Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.428.599	23.457.560	3.262.500	13,91	
								Penyusunan Renja	1 Dokumen			0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.375.200	12.962.000	-	0,00	
								Penyusunan RKA	1 Dokumen	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.136.280	1.966.280	1.385.000	70,44	
								Penyusunan RKA Perubahan	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.641.280	-	-	0,00	
								Penyusunan DPA	1 Dokumen	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.881.280	1.881.280	1.877.500	99,80	Sekretaris
								Penyusunan DPA Perubahan	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.641.280	-	-	0,00	
								Penyusunan Laporan relaisasi capaian kinerja per bulan/triwulan	4 dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	1.128.000	-	0,00	
								Penyusunan LKJIP	1 Dokumen	1		0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.448.999	5.520.000	-	0,00	
								Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen			0						
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	2.312.935.742	2.045.887.838	88,45	
								Pembayan gaji pegawai	12 kali	3	3	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	2.280.645.542	2.018.107.838	88,49	
								Pembayaran honorarium PPK Keu, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Pembantu Bendahara	12 kali	3	3	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	22.460.000	20.310.000	90,43	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
								Pelaksanaan penatausahaan keuangan	1 Dokumen	1	1	100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	4.740.000	4.740.000	100,00	Sekretaris
								Koordinasi pelaksanaan akuntansi	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	1.140.000	-	0,00	
								Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	-	-	0,00	
								Penyusunan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1	1	100	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000	2.730.000	2.730.000	100,00	
								Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	3 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.940.600	1.220.200	-	0,00	
								Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1		0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	-	-	0,00	Sekretaris
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	42.855.404	-	0,00	
								Pengadaan alat listrik	1 Paket			0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250	6.214.064	-	0,00	
								Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan	12 kali	3		0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	600.000	-	0,00	
								Penyediaan jamuan tamu	12 kali	3		0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	1.802.006	-	0,00	
								Pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder	14 kali	2		0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	34.239.334	-	0,00	Sekretaris
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.980.000	-	-	0,00	
								Pengadaan sarana pendukung kantor (laptop dan printer)	11 unit			0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000	-	-	0,00	
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	34.925.500	10.150.000	29,06	Sekretaris
								Pencatatan agenda surat masuk dan keluar	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	7.280.500	5.700.000	78,29	
								Pembayaran tagihan listrik dan air serta wifi	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000	23.145.000	-	0,00	
								penyediaan alat-alat kebersihan	1 Paket	1	1	100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500	4.500.000	4.450.000	98,89	Sekretaris
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	75.341.720	2.850.000	3,78	
								Pelaksanaan pemeliharaan mobil kepala dinas	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450	12.440.150	2.850.000	22,91	
								Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan oprasional	12 kali			0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700	59.734.902	-	0,00	
								Pelaksanaan pemeliharaan AC dan Komputer	14 unit			0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	3.166.668	-	0,00	
								Rehab Sekretariat FAS	1 Paket			0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	-	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
IV	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13,00	2,75		0,00						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	2.405.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	1.460.000	-	0,00	
								Koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.320.000	730.000	-	0,00	
								Koordinasi pelaksanaan PUG	2 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.320.000	730.000	-	0,00	
								Pendampingan pelaksanaan penyusunan ARG	1 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.380.000	-	-	0,00	
								Sosialisasi penyusunan ARG	1 kali			0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.580.000	-	-	0,00	
													Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000	945.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi	3 Dokumen			0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.115.000	945.000	-	0,00	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Pengadaan / Cetak KIE pemberdayaan perempuan	3 Dokumen			0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	-	0,00	
													PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	46.859.575	7.140.000	15,24	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
													Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	7.635.000	-	0,00	
								Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP	3 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	7.635.000	-	0,00	
								Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP	1 kali			0						
								KIE Pencegahan KTP	3 Dokumen			0						Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
													Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	28.664.575	4.290.000	14,97	
								Penangan/pelayanan kepada korba kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	28.664.575	4.290.000	14,97	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke I		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.510.000	10.560.000	2.850.000	26,99	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pengadaan ATK	1 Paket	1	1	100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	46.510.000	10.560.000	2.850.000	26,99	
								Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali			0	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
								Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali			0						
V	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	%	707,00	0,00		#DIV/0!						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000	560.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.160.000	560.000	-	0,00	
								Pengumpulan data gender dan anak	2 dokumen			0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.140.000	430.000	-	0,00	
								Penyusunan profil data gender dan anak	2 dokumen			0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.020.000	130.000	-	0,00	
													PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	218.158.000	26.315.000	17.000.000	64,60	
													Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.088.000	5.760.000	-	0,00	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Rapat Koordinasi gugus tugas KLA	2 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.738.000	3.890.000	-	0,00	
								Rapat Evaluasi KLA	3 kali			0						
								Rapat koordinasi pelembagaan pemenuhan hak anak	3 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	138.070.000	20.555.000	17.000.000	82,70	
								Sosialisasi penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	2 kali			0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.000	280.000	-	0,00	
								Temu anak samawa	1 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.325.000	880.000	-	0,00	
								Pengadaan KIE pemenuhan hak anak	2 dokumen			0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.025.000	-	-	0,00	
								Musrenbang Anak	1 kali	1	1	100	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.465.000	19.395.000	17.000.000	87,65	
								Pembentukan forum anak kecamatan	2 kali	1	1	100						
								pembinaan forum anak	1 kali			0						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
I	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,77	0,69	0,61	88,56						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	409.936.500	316.673.240	77,25	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
													Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	58.985.000	13.500.000	2.400.000	17,78	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	45.955.000	8.400.000	-	0,00	
								Penyusunan dokumen GDPK	1 Dokumen	1	1	100,00						
								Rapat Konsultasi dokumen GDPK	3 kali			0						
								Uji Publik dokumen GDPK	2 kali			0						
								Cetak dkumen GDPK	10 buku			0	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	5.100.000	2.400.000	47,06	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0						
								Rapat koordinasi pemutahiran data keluarga	3 kali	1	1	100	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.499.393.000	396.436.500	314.273.240	79,27	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	14.467.500	-	0,00	
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 kali	1	1	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	162.988.000	65.529.000	2.600.000	3,97	
								Register dan registrasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan	12 kali	3		0						
								Pemutakhiran data oleh PPKBD dan Sub PPKBD	2 kali	1	1	100	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	315.000.000	311.673.240	98,94	
								Pengolahan data di balai penyuluhan/UPT KB	12 kali	3	3	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	6.910.000	-	-	0,00	
								Sosialisasi pembentukan rumah data ku	3 kali	1	1	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	6.220.000	1.440.000	-	0,00	
								Pembinaan pencatatan dan pelaporan program	3 kali	1		0						
													PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	1.620.830.800	1.203.414.960	74,25	
													Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.079.467.000	496.513.000	353.888.560	71,27	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	32.468.000	-	0,00	
								Identifikasi dan seleksi kasus	2 kali	1		0						
								Diseminasi Audit Kasus Stunting	2 kali	1		0						
								Evaluasi Audit Kasus Stunting	2 kali			0						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.198.312.000	215.464.000	259.978.560	120,66	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penyuluhan program dan pembinaan lini lapangan	10 kali	3	2	67						
								Pembayaran jasa air dan listrik balai	12 kali	3	3	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0						
								Mini lokakarya Kecamatan	10 kali	3		0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	352.867.000	105.696.000	-	0,00	
								Cetak KIE	4 dokumen	x		0	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148.730.000	43.600.000	42.990.000	98,60	
								Promosi KIE lewat media massa	4 kali	x		0	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	99.285.000	50.920.000	51,29	
								Koordinasi TPPS Kabupaten				0						
								Evaluasi rencana aksi percepatan penurun stunting				0						
													Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	499.290.000	99.858.000	125.664.000	125,84	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	10 kali	x		0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	499.290.000	99.858.000	125.664.000	125,84	
													Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.017.264.000	911.572.600	703.846.400	77,21	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Distribusi alat obat kontrasepsi ke faskes	7 kali	x		0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	22.284.000	2.600.000	11,67	
								Pelayanan KB IUD	655 orang	x		0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1.134.857.000	131.072.600	-	0,00	
								Pelayanan KB Implant	2396 orang	x		0						
								Pelayanan KB MOW	35 orang	x		0						
								Pelayanan KB MOP	5 Orang	x		0						
								Pelayanan KB Cabut Implant	170 orang	x		0	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	3.000.000	1.700.000	56,67	
								Pembayaran kompensasi kegagalan penggunaan alokon	7 kali	x		0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	735.000.000	693.330.400	94,33	
								Pengadaan IUD Kit	25 Unit	25	25	100	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	9.176.000	6.216.000	67,74	
								Pengadaan Implant Removal Kit	36 Unit	36	36	100						
								Koordinasi pelayanan KB di Fasilitas kesehatan	3 kali	x		0	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	9.600.000	-	0,00	
								Pembinaan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	3 kali	x		0	Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.975.000	1.440.000	-	0,00	
								Pelayanan KB pada momentum	2 kali	x		0						
								Sosialisasi kesertaan KB pria	4 kali	x		0						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	539.459.000	112.887.200	20.016.000	17,73	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penguatan Kampung KB	1 kali	1		0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	-	-	0,00	
								Pembekalan POKJA kampung KB	1 kali	1	1	100	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	535.116.000	112.887.200	20.016.000	17,73	
								Pertemuan POKJA Kampung KB tingkat desa	6 kali	2		0						
II	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88,00	21,75		0,00						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	595.032.000	258.780.000	43,49	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
													Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	554.868.000	348.072.000	11.820.000	3,40	
								Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	24 kecamatan	6	5	83	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	24.860.000	2.220.000	8,93	
								Sosialisasi dan konseling PPKS	8 kali	3		0	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	68.768.000	17.192.000	-	0,00	
								Pengadaan BKB Kit Stunting	21 Unit			0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	275.000.000	252.000.000	-	0,00	
								Pembinaan dan pelatihan POKTAN	24 kecamatan	6		0	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	78.755.000	28.560.000	-	0,00	
								Pembinaan POKTAN yang ikut dalam lomba tingkat provinsi dan nasional	3 POKTAN	1	1	100	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	62.470.000	25.460.000	9.600.000	37,71	
													Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	246.960.000	246.960.000	100,00	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Pencatatan hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	3	4	133	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	117.600.000	117.600.000	100,00	
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	3	4	133	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.293.600.000	129.360.000	129.360.000	100,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	26.990.000	24.050.000	89,11	
													Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.030.000	24.610.000	23.350.000	94,88	Kepala Bidang Kesenjangan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Rapat Koordinasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	3 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.900.000	8.100.000	-	0,00	
								Cetak KIE Kesenjangan Gender	4 dokumen	4	4	100	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.350.000	11.350.000	23.350.000	0,00	
								Sosialisasi KIE Kesenjangan Gender melalui media massa	6 kali	2	1	50						
								Dialog Warga pencegahan perkawinan usia anak	2 kali			0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.780.000	5.160.000	-	0,00	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	8.290.000	2.380.000	700.000	29,41	Kepala Bidang Kesenjangan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Sosialisasi peningkatan peran puspaga	2 kali			0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	2.380.000	700.000	29,41	
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB			0,00						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	2.511.403.528	2.431.927.398	96,84	
													Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.428.599	10.881.200	-	0,00	Sekretaris
								Penyusunan Renja	1 Dokumen			0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.375.200	3.206.200	-	0,00	
								Penyusunan RKA	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.136.280	-	-	0,00	
								Penyusunan RKA Perubahan	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.641.280	-	-	0,00	
								Penyusunan DPA	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.881.280	-	-	0,00	
								Penyusunan DPA Perubahan	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.641.280	-	-	0,00	
								Penyusunan Laporan relaisasi capaian kinerja per bulan/triwulan	4 dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	-	-	0,00	
								Penyusunan LKJIP	1 Dokumen			0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.448.999	7.675.000	-	0,00	
								Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen			0						
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	2.243.194.720	2.248.456.819	100,23	
								Pembayaran gaji pegawai	12 kali	3	3	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	2.221.334.720	2.225.856.819	100,20	
								Pembayaran honorarium PPK Keu, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Pembantu Bendahara	12 kali	3	3	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	20.460.000	20.060.000	98,04	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
								Pelaksanaan penatausahaan keuangan	1 Dokumen			0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	-	-	0,00	Sekretaris
								Koordinasi pelaksanaan akuntansi	1 Dokumen	1	1	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	1.400.000	2.540.000	181,43	
								Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	-	-	0,00	
								Penyusunan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen			0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000	-	-	0,00	
								Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	3 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.940.600	-	-	0,00	
								Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen			0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	-	-	0,00	Sekretaris
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	42.855.393	41.948.579	97,88	
								Pengadaan alat listrik	1 Paket			0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250	6.214.062	-	0,00	
								Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan	12 kali	3		0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	600.000	-	0,00	
								Penyediaan jamuan tamu	12 kali	3		0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	1.801.998	-	0,00	
								Pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder	14 kali	5	6	120	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	34.239.333	41.948.579	122,52	Sekretaris
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.980.000	72.240.000	72.240.000	100,00	
								Pengadaan sarana pendukung kantor (laptop dan printer)	11 unit	6	6	100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000	72.240.000	72.240.000	100,00	Sekretaris
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	30.390.500	9.700.000	31,92	
								Pencatatan agenda surat masuk dan keluar	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	7.935.000	5.200.000	65,53	
								Pembayaran tagihan listrik dan air serta wifi	12 kali	3		0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000	16.250.000	-	0,00	
								penyediaan alat-alat kebersihan	1 Paket			0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500	6.205.500	4.500.000	72,52	Sekretaris
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	111.841.715	59.582.000	53,27	
								Pelaksanaan pemeliharaan mobil kepala dinas	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450	13.940.150	7.200.000	51,65	
								Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan oprasional	12 kali	6	6	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700	59.734.899	17.382.000	29,10	
								Pelaksanaan pemeliharaan AC dan Komputer	14 unit			0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	3.166.666	-	0,00	
								Rehab Sekretariat FAS	1 Paket	1	1	100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
IV	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13,00	2,75		0,00						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	33.630.000	14.350.000	42,67	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	16.290.000	-	0,00	
								Koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.320.000	8.670.000	-	0,00	
								Koordinasi pelaksanaan PUG	2 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.320.000	7.620.000	-	0,00	
								Pendampingan pelaksanaan penyusunan ARG	1 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.380.000	-	-	0,00	
								Sosialisasi penyusunan ARG	1 kali			0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.580.000	-	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000	8.540.000	5.550.000	64,99	
								Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi	3 Dokumen	1		0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.115.000	8.540.000	5.550.000	64,99	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	8.800.000	8.800.000	100,00	
								Pengadaan / Cetak KIE pemberdayaan perempuan	3 Dokumen	3	3	100	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	8.800.000	8.800.000	100,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	70.182.550	14.735.000	21,00	
													Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	21.690.000	5.550.000	25,59	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP	3 kali	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	21.690.000	5.550.000	25,59	
								Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP	1 kali	1	1	100						
								KIE Pencegahan KTP	3 Dokumen	1	1	100						
													Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	36.292.550	5.985.000	16,49	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penangan/pelayanan kepada korba kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	36.292.550	5.985.000	16,49	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke II		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.510.000	12.200.000	3.200.000	26,23	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.510.000	12.200.000	3.200.000	26,23	
								Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali	1	1	100						
								Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali			0						
V	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	%	707,00	0,00		#DIV/0!						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000	5.680.000	-	0,00	
													Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.160.000	5.680.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Pengumpulan data gender dan anak	2 dokumen			0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.140.000	5.680.000	-	0,00	
								Penyusunan profil data gender dan anak	2 dokumen			0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.020.000	-	-	0,00	
													PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	218.158.000	53.788.000	-	0,00	
													Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.088.000	27.618.000	-	0,00	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Rapat Koordinasi gugus tugas KLA	2 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.738.000	20.578.000	-	0,00	
								Rapat Evaluasi KLA	3 kali			0						
								Rapat koordinasi pelembagaan pemenuhan hak anak	3 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.350.000	7.040.000	-	0,00	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	138.070.000	26.170.000	-	0,00	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Sosialisasi penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	2 kali			0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.000	875.000	-	0,00	
								Temu anak samawa	1 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.325.000	20.520.000	-	0,00	
								Pengadaan KIE pemenuhan hak anak	2 dokumen			0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.025.000	4.775.000	-	0,00	
								Musrenbang Anak	1 kali			0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.465.000	-	-	0,00	
								Pembentukan forum anak kecamatan	2 kali			0						
								pembinaan forum anak	1 kali			0						

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN KE III
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
I	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,77	0,69	0,61	88,56						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	363.787.500	193.164.360	53,10	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
													Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	58.985.000	10.800.000	2.300.000	21,30	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	45.955.000	8.400.000	-	0,00	
								Penyusunan dokumen GDPK	1 Dokumen	1	1	100,00						
								Rapat Konsultasi dokumen GDPK	3 kali			0						
								Uji Publik dokumen GDPK	2 kali			0						
								Cetak dokumen GDPK	10 buku			0						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	2.400.000	2.300.000	95,83	
								Rapat koordinasi pemutahiran data keluarga	3 kali	1	1	100						
													Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.499.393.000	352.987.500	190.864.360	54,07	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	14.467.500	26.280.000	181,65	
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 kali	1	1	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0						
								Register dan registrasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan	12 kali	1	1	100	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	162.988.000	15.600.000	23.900.000	153,21	
								Pemutakhiran data oleh PPKBD dan Sub PPKBD	2 kali			0						
								Pengolahan data di balai penyuluhan/UPT KB	12 kali	3	3	100	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	315.000.000	134.093.610	42,57	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6.910.000	6.480.000	6.590.750	101,71	
								Sosialisasi pembentukan rumah data ku	3 kali	1	1	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	6.220.000	1.440.000	-	0,00	
								Pembinaan pencatatan dan pelporan program	3 kali	1		0						
													PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	1.682.774.650	1.237.932.300	73,56	
													Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.079.467.000	779.205.000	540.828.000	69,41	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	38.316.000	23.448.000	61,20	
								Identifikasi dan seleksi kasus	2 kali	1	2	200						
								Diseminasi Audit Kasus Stunting	2 kali	1	2	200						
								Evaluasi Audit Kasus Stunting	2 kali	1		0						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja										Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III			Capaian	Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III			Capaian
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.198.312.000	445.328.000	315.997.000	70,96	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penyuluhan program dan pembinaan lini lapangan	10 kali	3	3	100						
								Pembayaran jasa air dan listrik balai	12 kali	3	3	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.867.000	105.696.000	-	0,00	
								Mini lokakarya Kecamatan	10 kali	3		0	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148.730.000	95.000.000	91.583.000	96,40	
								Cetak KIE	4 dokumen	1		0	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	94.865.000	109.800.000	115,74	
												0	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	499.290.000	249.645.000	219.147.000	87,78	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	10 kali	1		0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	499.290.000	249.645.000	219.147.000	87,78	
													Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.017.264.000	386.058.650	383.599.900	99,36	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Distribusi alat obat kontrasepsi ke faskes	7 kali	1		0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	13.584.000	11.526.000	84,85	
								Pelayanan KB IUD	655 orang	1		0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1.134.857.000	336.358.650	345.128.700	102,61	
								Pelayanan KB Implant	2396 orang	1		0						
								Pelayanan KB MOW	35 orang	1		0						
								Pelayanan KB MOP	5 Orang	1		0						
								Pelayanan KB Cabut Implant	170 orang	1		0						
								Pembayaran kompensasi kegagalan penggunaan alokon	7 kali	1		0	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	13.500.000	3.800.000	28,15	
								Pengadaan IUD Kit	25 Unit			0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	2.400.000	2.143.500	89,31	
								Pengadaan Implant Removal Kit	36 Unit			0						
								Koordinasi pelayanan KB di Fasilitas kesehatan	3 kali	1		0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	9.176.000	21.001.700	228,88	
								Pembinaan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	3 kali	1		0	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	9.600.000	-	0,00	
								Pelayanan KB pada momentum	2 kali	1		0	Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.975.000	1.440.000	-	0,00	
								Sosialisasi kesertaan KB pria	4 kali	1		0						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	539.459.000	267.866.000	94.357.400	35,23	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penguatan Kampung KB	1 kali			0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	3.848.000	4.279.400	111,21	
								Pembekalan POKJA kampung KB	1 kali			0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	535.116.000	264.018.000	90.078.000	34,12	
								Pertemuan POKJA Kampung KB tingkat desa	6 kali	2	1	50						
II	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88,00	21,75		0,00						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	1.091.808.000	34.971.900	3,20	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
													Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	554.868.000	103.968.000	34.971.900	33,64	
								Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	24 kecamatan	6		0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	24.860.000	-	0,00	
								Sosialisasi dan konseling PPKS	8 kali	3	2	67	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	68.768.000	25.788.000	-	0,00	
								Pengadaan BKB Kit Stunting	21 Unit			0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	275.000.000	-	-	0,00	
								Pembinaan dan pelatihan POKTAN	24 kecamatan	6	7	117	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	78.755.000	28.560.000	14.000.000	49,02	
								Pembinaan POKTAN yang ikut dalam lomba tingkat provinsi dan nasional	3 POKTAN	1	1	100	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	62.470.000	24.760.000	20.971.900	84,70	
													Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	987.840.000	-	0,00	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Pencatatan hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	3		0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	470.400.000	-	0,00	
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	3		0	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.293.600.000	517.440.000	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	6.180.000	14.500.000	234,63	
													Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.030.000	4.080.000	10.720.000	262,75	Kepala Bidang Kesenjaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Rapat Koordinasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	3 kali	1	1	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.900.000	3.100.000	5.560.000	179,35	
								Cetak KIE Kesenjaraan Gender	4 dokumen			0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.350.000	-	-	0,00	
								Sosialisasi KIE Kesenjaraan Gender melalui media massa	6 kali	2	2	100						
								Dialog Warga pencegahan perkawinan usia anak	2 kali	1	1	100	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.780.000	980.000	5.160.000	526,53	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	8.290.000	2.100.000	3.780.000	180,00	Kepala Bidang Kesenjaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Sosialisasi peningkatan peran puspaga	2 kali	1	1	100	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	2.100.000	3.780.000	180,00	
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB			0,00						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	2.903.151.598	2.060.799.897	70,98	
													Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.428.599	66.530.280	28.283.977	42,51	
								Penyusunan Renja	1 Dokumen	1	1	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.375.200	11.207.000	24.282.477	216,67	
								Penyusunan RKA	1 Dokumen	1		0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.136.280	1.170.000	577.500	49,36	
								Penyusunan RKA Perubahan	1 Dokumen	1		0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.641.280	-	-	0,00	Sekretaris
								Penyusunan DPA	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.881.280	-	-	0,00	
								Penyusunan DPA Perubahan	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.641.280	-	-	0,00	
								Penyusunan Laporan relaisasi capaian kinerja per bulan/triwulan	4 dokumen	4	4	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	3.176.280	2.632.500	82,88	
								Penyusunan LKJIP	1 Dokumen			0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.448.999	50.977.000	791.500	1,55	
								Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen	1	1	100						
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	2.644.684.210	1.827.455.374	69,10	
								Pembayan gaji pegawai	12 kali	3	3	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	2.623.864.010	1.808.235.374	68,91	
								Pembayaran honorarium PPK Keu, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Pembantu Bendahara	12 kali	3	3	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	20.460.000	19.220.000	93,94	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja										Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III			Capaian	Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III			Capaian
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
								Pelaksanaan penatausahaan keuangan	1 Dokumen			0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	-	-	0,00	Sekretaris
								Koordinasi pelaksanaan akuntansi	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	-	-	0,00	
								Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	-	-	0,00	
								Penyusunan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen			0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000	-	-	0,00	
								Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	3 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.940.600	360.200	-	0,00	
								Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1		0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	-	-	0,00	
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	42.855.393	60.633.523	141,48	Sekretaris
								Pengadaan alat listrik	1 Paket			0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250	6.214.062	-	0,00	
								Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan	12 kali	3		0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	600.000	-	0,00	
								Penyediaan jamuan tamu	12 kali	1		0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	1.801.998	-	0,00	
								Pelaksanaan rapat koordinasi dengan steak holder	14 kali	4	8	200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	34.239.333	60.633.523	177,09	
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.980.000	46.740.000	46.050.000	98,52	Sekretaris
								Pengadaan sarana pendukung kantor (laptop dan printer)	11 unit	5	5	100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000	46.740.000	46.050.000	98,52	
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	25.950.000	10.300.000	39,69	Sekretaris
								Pencatatan agenda surat masuk dan keluar	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	6.000.000	5.800.000	96,67	
								Pembayaran tagihan listrik dan air serta wifi	12 kali	3		0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000	15.450.000	-	0,00	
								penyediaan alat-alat kebersihan	1 Paket			0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500	4.500.000	4.500.000	100,00	
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	76.391.715	88.077.023	115,30	Sekretaris
								Pelaksanaan pemeliharaan mobil kepala dinas	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450	12.440.150	4.150.000	33,36	
								Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan oprasinal	12 kali	6	6	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700	60.784.899	74.427.023	122,44	
								Pelaksanaan pemeliharaan AC dan Komputer	14 unit	14	14	100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	3.166.666	9.500.000	300,00	
								Rehab Sekretariat FAS	1 Paket			0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	-	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
IV	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13,00	2,75		0,00						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	23.440.000	25.170.000	107,38	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	14.900.000	16.740.000	112,35	
								Koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 kali	1	2	200	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.320.000	1.920.000	11.180.000	582,29	
								Koordinasi pelaksanaan PUG	2 kali	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.320.000	1.920.000	5.560.000	289,58	
								Pendampingan pelaksanaan penyusunan ARG	1 kali			0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.380.000	8.850.000	-	0,00	
								Sosialisasi penyusunan ARG	1 kali			0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.580.000	2.210.000	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000	8.540.000	8.430.000	98,71	
								Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi	3 Dokumen	1	1	100	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.115.000	8.540.000	8.430.000	98,71	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	-	0,00	
								Pengadaan / Cetak KIE pemberdayaan perempuan	3 Dokumen			0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
													PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	67.854.175	35.735.489	52,67	
													Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	14.880.000	14.880.000	100,00	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP	3 kali	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	14.880.000	14.880.000	100,00	
								Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP	1 kali			0						
								KIE Pencegahan KTP	3 Dokumen			0						
													Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	37.674.175	17.955.489	47,66	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penangan/pelayanan kepada korba kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	1	6	600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	37.674.175	17.955.489	47,66	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke III		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
													PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.175.000	46.165.000	36.551.040	79,17	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
													Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.545.000	7.440.000	6.000.000	80,65	
								Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA	3 kali	1	1	100	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.545.000	7.440.000	6.000.000	23,04	
								Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTA	1 kali			0						
								KIE Pencegahan KTA	3 Dokumen			0						
													Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.120.000	28.350.000	30.551.040	107,76	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pembinaan anggota PATBM	2 kali			0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.720.000	-	-	0,00	
								Penangan/pelayanan kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	4	9	225	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	133.400.000	28.350.000	30.551.040	107,76	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	10.375.000	-	0,00	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali	1	1	100	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000	10.375.000	-	0,00	
								Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali	1	1	100						

PEMERINTAH KABUPATEN

SUMBAWA

DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

BERKEMBANGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sumbawa Besar, 8 Oktober 2024

la Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sumbawa

KEPUTI SUMADI ARTA, SH

NIP. 19694231 199403 1 094

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,77	0,69	0,61	88,56						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	430.441.500	709.733.680	164,89		
													Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	58.985.000	30.825.000	7.466.500	24,22	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	45.955.000	28.425.000	1.777.000	6,25		
								Penyusunan dokumen GDPK	1 Dokumen			0							
								Rapat Konsultasi dokumen GDPK	3 kali	3		0							
								Uji Publik dokumen GDPK	2 kali	1		0							
								Cetak dkumen GDPK	10 buku	1	1	100							
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	2.400.000	5.689.500	237,06	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	
								Rapat koordinasi pemutahiran data keluarga	3 kali	1	1	100	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.499.393.000	399.616.500	702.267.180	175,74		
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	17.617.500	35.722.500	202,77		
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 kali	1	1	100							
								Pengadaan ATK	1 Paket			0							
								Register dan registrasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan	12 kali	1		0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	162.988.000	65.529.000	131.863.000	201,23		
								Pemutakhiran data oleh PPKBD dan Sub PPKBD	2 kali	1	10	1000							
								Pengolahan data di balai penyuluhan/UPT KB	12 kali	3	3	100	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	315.000.000	532.813.680	169,15		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6.910.000	-	-	0,00		
								Sosialisasi pembentukan rumah data ku	3 kali	1	1	100							
								Pengadaan ATK	1 Paket			0							
								Pembinaan pencatatan dan pelporan program	3 kali	1	1	100	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	6.220.000	1.470.000	1.868.000	127,07		
													PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	1.153.344.600	1.564.834.500	135,68		
													Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.079.467.000	493.430.000	698.861.700	141,63		
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	12.036.000	38.877.050	323,01		
								Identifikasi dan seleksi kasus	2 kali			0							
								Diseminasi Audit Kasus Stunting	2 kali			0							
								Evaluasi Audit Kasus Stunting	2 kali	1	1	100							

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.198.312.000	374.208.000	390.468.100	104,35	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penyuluhan program dan pembinaan lini lapangan	10 kali	4	3	75						
								Pembayaran jasa air dan listrik balai	12 kali	3	3	100						
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.867.000	70.516.000	172.549.300	244,70	
								Mini lokakarya Kecamatan	10 kali	2	2	100						
								Cetak KIE	4 dokumen			0						
								Promosi KIE lewat media massa	4 kali	1		0						
								Koordinasi TPPS Kabupaten				0	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	26.670.000	96.838.250	363,10	
								Evaluasi rencana aksi percepatan penurunan stunting				0						
																		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB
								Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	10 kali	1		0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	499.290.000	99.858.000	148.104.000	148,31	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
													Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.017.264.000	454.869.400	550.270.500	120,97	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Distribusi alat obat kontrasepsi ke faskes	7 kali	1		0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	10.248.000	7.538.000	73,56	
								Pelayanan KB IUD	655 orang	1		0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1.134.857.000	432.854.400	532.877.500	123,11	
								Pelayanan KB Implant	2396 orang	1		0						
								Pelayanan KB MOW	35 orang	1		0						
								Pelayanan KB MOP	5 Orang	1		0						
								Pelayanan KB Cabut Implant	170 orang	1		0						
								Pembayaran kompensasi kegagalan penggunaan alokon	7 kali	1		0	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	4.050.000	3.428.000	84,64	
								Pengadaan IUD Kit	25 Unit			0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	42.000	-	0,00	
								Pengadaan Implant Removal Kit	36 Unit			0						
								Koordinasi pelayanan KB di Fasilitas kesehatan	3 kali			0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	-	-	0,00	
								Pembinaan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	3 kali			0						
								Pelayanan KB pada momentum	2 kali			0	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	6.020.000	6.213.000	103,21	
								Sosialisasi kesertaan KB pria	4 kali	1		0	Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.975.000	1.655.000	214.000	12,93	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	539.459.000	105.187.200	167.598.300	159,33	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
								Penguatan Kampung KB	1 kali			0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	-		0,00	
								Pembekalan POKJA kampung KB	1 kali			0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	535.116.000	105.187.200	167.598.300	159,33	
								Pertemuan POKJA Kampung KB tingkat desa	6 kali	2	1	50						
II	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88,00	21,75		0,00						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	1.033.482.000	2.304.197.950	222,95	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
													Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	554.868.000	45.642.000	376.697.950	825,33	
								Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	24 kecamatan	6	19	317	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	1.225.000	42.913.500	3.503,14	
								Sosialisasi dan konseling PPKS	8 kali	2	2	100	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	68.768.000	17.192.000	11.047.300	64,26	
								Pengadaan BKB Kit Stunting	21 Unit	21	21	100	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	275.000.000	23.000.000	248.648.400	1.081,08	
								Pembinaan dan pelatihan POKTAN	24 kecamatan	6	17	283	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	78.755.000	1.225.000	60.660.750	4.951,90	
								Pembinaan POKTAN yang ikut dalam lomba tingkat provinsi dan nasional	3 POKTAN			0	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	62.470.000	3.000.000	13.428.000	447,60	
													Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	987.840.000	1.927.500.000	195,12	
								Pencatatan hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	3	6	200	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	470.400.000	858.300.000	182,46	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	10 kali	3	6	200	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.293.600.000	517.440.000	1.069.200.000	206,63	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	102.260.000	92.921.850	90,87	
													Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Ksetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.030.000	99.180.000	89.111.850	89,85	Kepala Bidang Ksetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Rapat Koordinasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	3 kali	1	1	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.900.000	80.970.000	81.491.850	100,64	
								Cetak KIE Ksetaraan Gender	4 dokumen			0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.350.000	12.000.000	-	0,00	
								Sosialisasi KIE Ksetaraan Gender melalui media massa	6 kali	1	2	200						
								Dialog Warga pencegahan perkawinan usia anak	2 kali	1	1	100	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.780.000	6.210.000	7.620.000	122,71	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	8.290.000	3.080.000	3.810.000	123,70	Kepala Bidang Ksetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Sosialisasi peningkatan peran puspaga	2 kali	1	1	100	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	3.080.000	3.810.000	123,70	
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB			0,00						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	814.738.758	1.936.263.006	237,65	
													Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.428.599	5.559.559	8.891.600	159,93	Sekretaris
								Penyusunan Renja	1 Dokumen			0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.375.200	-	-	0,00	
								Penyusunan RKA	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.136.280	-	-	0,00	
								Penyusunan RKA Perubahan	1 Dokumen	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.641.280	1.641.280	1.488.000	90,66	
								Penyusunan DPA	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.881.280	-	-	0,00	
								Penyusunan DPA Perubahan	1 Dokumen	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.641.280	1.641.280	1.488.000	90,66	
								Penyusunan Laporan relaisasi capaian kinerja per bulan/triwulan	4 dokumen			0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	-	-	0,00	
								Penyusunan LKJIP	1 Dokumen	1	1	100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.448.999	2.276.999	5.915.600	259,80	
								Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen			0						
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	765.613.139	1.814.495.332	237,00	
								Pembayan gaji pegawai	12 kali	3	3	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	740.756.739	1.786.918.532	241,23	
								Pembayaran honorarium PPK Keu, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Pembantu Bendahara	12 kali	3	3	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	20.460.000	21.600.000	105,57	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja										Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV			Capaian	Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV			Capaian
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pelaksanaan penatausahaan keuangan	1 Dokumen			0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	-	-	0,00	Sekretaris
								Koordinasi pelaksanaan akuntansi	1 Dokumen			0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	-	-	0,00	
								Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	2.256.200	2.256.200	100,00	
								Penyusunan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen			0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000	-	-	0,00	
								Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	3 Dokumen	3	3	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.940.600	360.200	1.940.600	538,76	
								Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1	1	100	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	1.780.000	1.780.000	100,00	Sekretaris
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	8.616.060	11.877.500	137,85	
								Pengadaan alat listrik	1 Paket	1	1	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250	6.214.062	7.795.000	125,44	
								Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan	12 kali	3		0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	600.000	-	0,00	
								Penyediaan jamuan tamu	12 kali	1	8	800	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.208.000	1.801.998	4.082.500	226,55	
								Pelaksanaan rapat koordinasi dengan steak holder	14 kali	3		0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	-		0,00	Sekretaris
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.980.000	-	-	0,00	
								Pengadaan sarana pendukung kantor (laptop dan printer)	1 unit			0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000	-	-	0,00	
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	31.950.000	76.156.166	238,36	Sekretaris
								Pencatatan agenda surat masuk dan keluar	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	6.000.000	8.623.500	143,73	
								Pembayaran tagihan listrik dan air serta wifi	12 kali	3	5	167	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000	21.450.000	63.032.666	293,86	
								penyediaan alat-alat kebersihan	1 Paket			0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500	4.500.000	4.500.000	100,00	Sekretaris
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	3.000.000	24.842.408	828,08	
								Pelaksanaan pemeliharaan mobil kepala dinas	12 kali	3	3	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450	3.000.000	24.842.408	828,08	
								Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan oprasional	12 kali			0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700	-	-	0,00	
								Pelaksanaan pemeliharaan AC dan Komputer	14 unit			0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	-	-	0,00	
								Rehab Sekretariat FAS	1 Paket			0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	-	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IV	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13,00	2,75		0,00						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	19.040.000	38.069.000	199,94	
													Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	12.950.000	27.934.000	215,71	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.320.000	-	-	0,00	
								Koordinasi pelaksanaan PUG	2 kali	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.320.000	1.050.000	5.620.000	535,24	
								Pendampingan pelaksanaan penyusunan ARG	1 kali	1	1	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.380.000	2.530.000	11.057.000	437,04	
								Sosialisasi penyusunan ARG	1 kali	1	1	100	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.580.000	9.370.000	11.257.000	120,14	
													Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000	6.090.000	10.135.000	166,42	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi	3 Dokumen	1	1	100	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.115.000	6.090.000	10.135.000	166,42	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	-	0,00	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Pengadaan / Cetak KIE pemberdayaan perempuan	3 Dokumen			0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	-	-	0,00	
													PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	49.243.700	89.841.133	182,44	
													Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	15.440.000	38.853.500	251,64	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP	3 kali	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	15.440.000	38.853.500	251,64	
								Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP	1 kali		0							
								KIE Pencegahan KTP	3 Dokumen		0							
													Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	25.353.700	16.760.633	66,11	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penangan/pelayanan kepada korba kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	1	3	300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	25.353.700	16.760.633	66,11	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.510.000	8.450.000	34.227.000	405,05	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pengadaan ATK	1 Paket			0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.510.000	8.450.000	34.227.000	405,05	
								Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali	1	1	100						
								Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali	1	1	100						
V	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	%	707,00	0,00		#DIV/0!						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000	9.940.000	12.920.000	129,98	
													Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.160.000	9.940.000	12.920.000	129,98	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
								Pengumpulan data gender dan anak	2 dokumen	1	1	100	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.140.000	1.050.000	3.900.000	371,43	
								Penyusunan profil data gender dan anak	2 dokumen	1	2	200	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.020.000	8.890.000	9.020.000	101,46	
													PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	218.158.000	84.065.000	103.200.750	122,76	
													Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.088.000	40.990.000	53.115.750	129,58	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Rapat Koordinasi gugus tugas KLA	2 kali	1	1	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.738.000	40.990.000	53.115.750	129,58	
								Rapat Evaluasi KLA	3 kali	1	1	100						
								Rapat koordinasi pelembagaan pemenuhan hak anak	3 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.350.000	-	-	0,00	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	138.070.000	43.075.000	50.085.000	116,27	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Sosialisasi penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	2 kali			0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.000	-	-	0,00	
								Temu anak samawa	1 kali			0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.325.000	1.225.000	3.075.000	251,02	
								Pengadaan KIE pemenuhan hak anak	2 dokumen	2	2	100	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.025.000	23.250.000	4.775.000	20,54	
								Musrenbang Anak	1 kali			0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.465.000	18.600.000	42.235.000	227,07	
								Pembentukan forum anak kecamatan	2 kali	1	1	100						
								pembinaan forum anak	1 kali	1	1	100						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja											Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		Uraian	satuan	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	Aktivitas Utama	target tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian		Rp.	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ke IV		Capaian	
					Target	Realisasi				Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.175.000	65.052.500	84.781.556	130,33	
													Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.545.000	15.440.000	28.079.400	181,86	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA	3 kali	1	1	100	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.545.000	15.440.000	28.079.400	23,04	
								Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTA	1 kali			0						
								KIE Pencegahan KTA	3 Dokumen			0						
													Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.120.000	42.862.500	22.431.156	52,33	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pembinaan anggota PATBM	2 kali	1	1	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.720.000	12.500.000	2.880.000	23,04	
								Penangan/pelayanan kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan	16 Orang	4	5	125	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	133.400.000	30.362.500	19.551.156	64,39	
													Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	6.750.000	34.271.000	507,72	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
								Pelatihan manajemen dan penanganan kasus	2 kali			0	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000	6.750.000	34.271.000	507,72	
								Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus	2 kali			0						

Sumbawa Besar, 9 Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa

1 KEZUT-SUMADI ARTA, SH
NIP. 19691231 199403 1 094

REKAPITULASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Total Realisasi	%
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77	0,69	0,30	43,32	0,69	0,38	54,87	0,69	0,85	122,74	0,69	0,92	133,29	2,45	112,92
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	88,00	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	37,82	83,97	222,02	83,97	95,42
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BB	BB	0,00	0,00	0,00	0,00	BB	100
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	13,00	2,75	0,00	0,00	2,75	23,07	839,03	2,75	23,07	839,03	5,18	23,07	445,06	69,22	532,46
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	775,46	10367,11	0,00	0,00	0,00	775,46	109,68

No	Program	Anggaran (Rp)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Total Realisasi	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	354.212.500	281.187.380	79,38	409.936.500	316.673.240	77,25	363.787.500	193.164.360	53,10	430.441.500	709.733.680	164,89	1.500.758.660	96,3
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	678.529.950	177.084.000	26,10	1.620.830.800	1.203.414.960	74,25	1.682.774.650	1.237.932.300	73,56	1.153.344.600	1.564.834.500	135,68	4.183.265.760	81,5
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	304.146.000	2.850.000	0,94	595.032.000	258.780.000	43,49	1.091.808.000	34.971.900	3,20	1.033.482.000	2.304.197.950	222,95	2.600.799.850	86,0
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	1.890.000	-	-	26.990.000	24.050.000	89,11	6.180.000	14.500.000	234,63	102.260.000	92.921.850	90,87	131.471.850	95,7
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	2.489.515.926	2.062.150.338	82,83	2.511.403.528	2.431.927.398	96,84	2.903.151.598	2.060.799.897	70,98	814.738.758	1.936.263.006	237,65	8.491.140.639	97,4
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	2.405.000	-	-	33.630.000	14.350.000	42,67	23.440.000	25.170.000	107,38	19.040.000	38.069.000	199,94	77.589.000	98,8
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	46.859.575	7.140.000	15,24	70.182.550	14.735.000	21,00	67.854.175	35.735.489	52,67	49.243.700	89.841.133	182,44	147.451.622	63,0
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000	560.000	-	-	5.680.000	-	-	980.000	2.780.000	283,67	9.940.000	12.920.000	129,98	15.700.000	91,5
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	218.158.000	24.115.000	17.000.000	70,50	53.788.000	-	-	56.190.000	68.585.000	122,06	84.065.000	103.200.750	122,76	188.785.750	86,5
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.175.000	50.799.200	-	-	73.158.300	28.804.000	39,37	46.165.000	36.551.040	79,17	65.052.500	84.781.556	130,33	150.136.596	63,8
TOTAL		19.357.603.810	3.953.033.151	2.547.411.718	64,44	5.400.631.678	4.292.734.598	79,49	6.242.330.923	3.710.189.986	59,44	3.761.608.058	6.936.763.425	184,41	17.487.099.727	90,34

Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumbawa

IKETUT SUMADI ARTA, SH
NIP. 19691231 199403 1 094

MATRIKS HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,77	2,45	112,92	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.558.378.000	1.500.758.660	96,30
							Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	58.985.000	13.906.500	23,58
							Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	45.955.000	1.777.000	3,87
							Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	12.129.500	93,09
							Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.499.393.000	1.486.852.160	99,16
							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	62.002.500	97,99
							Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	162.988.000	161.213.000	98,91
							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	1.255.177.910	99,62
							Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6.910.000	6.590.750	95,38
							Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	6.220.000	1.868.000	30,03
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	5.135.480.000	4.183.265.760	81,46
							Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.079.467.000	1.722.530.260	82,84
							Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	62.325.050	64,31
							Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.198.312.000	1.060.163.660	88,47
							Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.867.000	207.781.300	88,47
							Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148.730.000	134.702.000	58,88
							Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	257.558.250	90,57
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	499.290.000	492.915.000	91,13
							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	499.290.000	492.915.000	98,72
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.017.264.000	1.643.416.800	98,72
							Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	24.514.000	81,47
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	1.134.857.000	878.006.200	43,31
							Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	11.778.000	77,37

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	695.473.900	49,12
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	27.217.700	94,31
							Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	6.213.000	97,35
							Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.975.000	214.000	20,40
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	539.459.000	324.403.700	3,58
							Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	4.279.400	60,14
							Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	535.116.000	320.124.300	
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	88,00	83,97	95,42	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	3.024.468.000	2.600.799.850	85,99
							Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	554.868.000	426.339.850	76,84
							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	45.133.500	64,59
							Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	68.768.000	11.047.300	16,06
							Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	275.000.000	248.648.400	90,42
							Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	78.755.000	74.660.750	94,80
							Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	62.470.000	46.849.900	75,00
							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	2.174.460.000	
							Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	975.900.000	
							Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.293.600.000	1.198.560.000	
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	137.320.000	131.471.850	95,74
							Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.030.000	123.181.850	95,47
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.900.000	87.051.850	93,70
							Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.350.000	23.350.000	100,00
							Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.780.000	12.780.000	100,00
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	8.290.000	100,00
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.290.000	8.290.000	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.809.810	8.491.140.639	97,39
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.428.599	40.438.077	38,00
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.375.200	24.282.477	88,70
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.136.280	1.962.500	62,57
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.641.280	1.488.000	90,66
							Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.881.280	1.877.500	99,80
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.641.280	1.488.000	90,66
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	2.632.500	61,16
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.448.999	6.707.100	10,09
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	7.936.295.363	99,62
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	7.839.118.563	99,65
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	81.190.000	96,84
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	4.740.000	100,00
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	2.540.000	100,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	2.256.200	100,00
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.730.000	2.730.000	100,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.940.600	1.940.600	100,00
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	1.780.000	100,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	114.459.602	83,44
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.856.250	7.795.000	31,36
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	-	0,00
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	4.082.500	56,64
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	102.582.102	99,87
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.980.000	118.290.000	99,42
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.980.000	118.290.000	99,42
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	106.306.166	86,28
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	25.323.500	93,05
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.295.000	63.032.666	82,62
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.705.500	17.950.000	91,09
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	175.351.431	65,78
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.820.450	39.042.408	93,36
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.254.700	91.809.023	50,93
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	9.500.000	100,00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	%	13,00	69,22	532,46	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	78.515.000	77.589.000	98,82
							Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.600.000	44.674.000	97,97
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.320.000	11.180.000	98,76
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.320.000	11.180.000	98,76
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.380.000	11.057.000	97,16
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.580.000	11.257.000	97,21
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000	24.115.000	100,00
							Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.115.000	24.115.000	100,00
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	8.800.000	100,00
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.800.000	8.800.000	100,00
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.140.000	147.451.622	62,98
							Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	59.283.500	99,39
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.645.000	59.283.500	99,39
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	44.991.122	35,15
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.985.000	44.991.122	35,15
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.510.000	43.177.000	92,83
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.510.000	43.177.000	92,83
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	707,00	775,46	109,68	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	17.160.000	15.700.000	91,49
							Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.160.000	15.700.000	91,49
							Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.140.000	6.680.000	82,06
							Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.020.000	9.020.000	100,00
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	218.158.000	188.785.750	86,54
							Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.088.000	74.305.750	92,78
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.738.000	64.395.750	92,34
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.350.000	9.910.000	95,75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	138.070.000	114.480.000	82,91
							Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.000	17.255.000	100,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.325.000	33.215.000	99,67
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.025.000	4.775.000	17,04
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.465.000	59.235.000	99,61
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.175.000	150.136.596	63,84
							Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.545.000	47.519.400	92,19
							Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.545.000	47.519.400	92,19
							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.120.000	68.346.196	45,83
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.720.000	2.880.000	18,32
							Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	133.400.000	65.466.196	49,08
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	34.271.000	99,31
							Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000	34.271.000	99,31
								19.357.603.810	17.487.099.727	90,34



Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
 Dit. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 dan Berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumbawa

KEPUT. SUMADIARTA, SH
 NIP. 19691231 199403 1 094

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		9.718.326.000			6.641.407.470					
1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.558.378.000		1,84 %	1.500.758.660	96,30			1,32 %	139,394
1.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	58.985.000		2 Dokumen	13.906.500	23,58			2 Dokumen	100,00
1.1.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	45.955.000	1 Dokumen		1.777.000	3,87	1 Dokumen	100,00		
1.1.1.2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Lap Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	1 Dokumen		12.129.500	93,09	1 Dokumen	100,00		
1.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	1.499.393.000		5 Dokumen	1.486.852.160	99,16			5 Dokumen	100
1.1.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	1 Dokumen		62.002.500	97,99	1 Dokumen	100,00		
1.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	162.988.000	1 Dokumen		161.213.000	98,91	1 Dokumen	100,00		
1.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan Pelap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	12 Dokumen		1.255.177.910	99,62	12 Dokumen	100,00		
1.1.2.4	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk	6.910.000	151 Rumah Data Kependuduk an		6.590.750	95,38	151 Rumah Data Kependuduk an	100,00		
1.1.2.5	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6.220.000	1 Dokumen		1.868.000	30,03	1 Dokumen	100,00		
1.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	3.118.216.000		13,90 %	2.539.848.960	81,45			9,02 %	154,102
1.3		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2.017.264.000		64,00 %	1.643.416.800	81,47			66,21 %	103,45
1.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	2.079.467.000		100 %	1.722.530.260	82,84			94,63 %	94,63
1.2.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian ProgramKKBPK	96.918.000	3 Dokumen		62.325.050	64,31	3 Dokumen			
1.2.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1.198.312.000	24 Balai Penyuluhan KB		1.060.163.660	88,47	24 Balai Penyuluhan KB			
1.2.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcarn, Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcarn, Rakordes, dan Minilok	352.867.000	10 Laporan		207.781.300	58,88	10 Laporan	100,00		
1.2.1.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang	148.730.000	5 Buah		134.702.000	90,57	5 Buah	100,00		
1.2.1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	15 Organisasi		257.558.250	91,13	15 Organisasi	100,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	499.290.000		50,30 %	492.915.000	98,72			39,39 %	78,31
1.2.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	499.290.000	979 Orang		492.915.000	98,72	979 Orang	100,00		
1.2.3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	539.459.000		34 Kelompok	324.403.700	60,14			34 Kelompok	100
1.2.3.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	2 Dokumen		4.279.400	98,54	2 Dokumen	100,00		
1.2.3.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	535.116.000	34 Kampung Kb		320.124.300	59,82	34 Kampung Kb	100,00		
1.3.1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	2.017.264.000		100 %	1.643.416.800	81,47			100 %	100
1.3.1.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	12 Dokumen		24.514.000	43,31	12 Dokumen	100,00		
1.3.1.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.134.857.000	3075 Orang		878.006.200	77,37	3075 Orang	100,00		
1.3.1.3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	5 Kasus		11.778.000	49,12	5 Kasus	100,00		
1.3.1.4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	59 Unit		695.473.900	94,31	59 Unit	100,00		
1.3.1.5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	2 Dokumen		27.217.700	97,35	2 Dokumen	100,00		
1.3.1.6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Lap Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	4 Dokumen		6.213.000	20,40	4 Dokumen	100,00		
1.3.1.7	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5.975.000	100 Akseptor		214.000	3,58	100 Akseptor	100,00		
1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	3.024.468.000		19.179 KK	2.600.799.850	85,99			22.983 KK	119,834
1.4.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	554.868.000		26 Tahun	426.339.850	76,84			22,5 Tahun	86,5385
1.4.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	1 Dokumen		45.133.500	64,59	1 Dokumen	100,00		
1.4.1.2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	68.768.000	8 Laporan		11.047.300	16,06	8 Laporan	100,00		
1.4.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	275.000.000	26 Unit		248.648.400	90,42	26 Unit	100,00		
1.4.1.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.755.000	20 Kader		74.660.750	94,80	20 Kader	100,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1.4.1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.470.000	20 Kader		46.849.900	75,00	20 Kader	100,00		
1.4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000		392 Lembaga	2.174.460.000	88,05			392 Lembaga	100
1.4.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	100 Persen		975.900.000	82,98	100 Persen	100,00		
1.4.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1.293.600.000	3825 Keluarga		1.198.560.000	92,65	3825 Keluarga	100,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		9.639.277.810			9.169.360.457					
2.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	137.320.000		80 %	131.471.850	95,74			72,26 %	90,33
2.1.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	129.030.000		4 Indikator	123.181.850	95,47			3 Indikator	75
2.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	92.900.000	25 OPD		87.051.850	93,70	25 OPD	100,00		
2.1.1.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	23.350.000	4 Unit		23.350.000	100,00	4 Unit	100,00		
2.1.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	12.780.000	1 Kegiatan		12.780.000	100,00	1 Kegiatan	100,00		
2.1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	8.290.000		1 Lembaga	8.290.000	100,00			1 Lembaga	100
2.1.2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	8.290.000	1 Lembaga		8.290.000	100,00	1 Lembaga	100,00		
2.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENINGKATAN NILAI AKIP DINAS P2KBP3A	8.718.809.810		75,49 Poin	8.491.140.639	97,39			73,39 Poin	97,2182
2.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	106.428.599		7 Dokumen	40.438.077	38,00			7 Dokumen	100
2.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan PD	27.375.200	1 Dokumen		24.282.477	88,70	1 Dokumen	100,00		
2.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	3.136.280	1 Dokumen		1.962.500	62,57	1 Dokumen	100,00		
2.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1.641.280	1 Dokumen		1.488.000	90,66	1 Dokumen	100,00		
2.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	1.881.280	1 Dokumen		1.877.500	99,80	1 Dokumen	100,00		
2.2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil	1.641.280	1 Dokumen		1.488.000	90,66	1 Dokumen	100,00		
2.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	2 Dokumen		2.632.500	61,16	2 Dokumen	100,00		
2.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	66.448.999	4 Dokumen		6.707.100	10,09	4 Dokumen	100,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
2.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811		8 Dokumen	7.936.295.363	99,62			8 Dokumen	100
2.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	69 Orang		7.839.118.563	99,65	68 Orang	98,55		
2.2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	3 Dokumen		81.190.000	96,84	3 Dokumen	100,00		
2.2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	538 Dokumen		4.740.000	100,00	538 Dokumen	100		
2.2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	1 Dokumen		2.540.000	100,00	1 Dokumen	100,00		
2.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	1 Dokumen		2.256.200	100,00	1 Dokumen	100,00		
2.2.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.730.000	1 Dokumen		2.730.000	100,00	1 Dokumen	100,00		
2.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	1.940.600	4 Dokumen		1.940.600	100,00	4 Dokumen	100,00		
2.2.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	1 Dokumen		1.780.000	100,00	1 Dokumen	100,00		
2.2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250		4 Dokumen	114.459.602	83,44			3 Dokumen	75
2.2.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24.856.250	5 Unit		7.795.000	31,36	4 Unit	80,00		
2.2.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000	12 Dokumen		-	0,00	0 Dokumen	0,00		
2.2.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	12 Dokumen		4.082.500	56,64	12 Dokumen	100,00		
2.2.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	21 Dokumen		102.582.102	99,87	22 Dokumen	104,76		
2.2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	118.980.000		1 Dokumen	118.290.000	99,42			1 Dokumen	100,00
2.2.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118.980.000	11 Unit		118.290.000	99,42	11 Unit	100,00		
2.2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000		3 Dokumen	106.306.166	86,28			3 Dokumen	100,00
2.2.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	2 Dokumen		25.323.500	93,05	2 Dokumen	100,00		
2.2.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	76.295.000	3 Dokumen		63.032.666	82,62	3 Dokumen	100,00		
2.2.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19.705.500	1 Orang		17.950.000	91,09	1 Orang	100,00		
2.2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150		4 Dokumen	175.351.431	65,78			4 Dokumen	100
2.2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41.820.450	1 Unit		39.042.408	93,36	1 Unit	100,00		
2.2.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180.254.700	5 Unit		91.809.023	50,93	5 Unit	100,00		
2.2.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.500.000	15 Unit		9.500.000	100,00	15 Unit	100,00		
2.2.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.000.000	1 Unit		35.000.000	100,00	1 Unit	100,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
2.3	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	45.600.000		54,57 %	44.674.000	97,97			56,36 %	103,28
2.4		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	32.915.000		0,062 %	32.915.000				0,061 %	98,39
2.3.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	45.600.000		45 Kegiatan/Sub Kegiatan	44.674.000	97,97			31 Kegiatan/Sub Kegiatan	68,89
2.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kab/Kota	11.320.000	1 Dokumen		11.180.000	98,76	1 Dokumen	100,00		
2.3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	11.320.000	1 Buah		11.180.000	98,76	1 Buah	100,00		
2.3.1.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	11.380.000	40 OPD		11.057.000	97,16	40 OPD	100,00		
2.3.1.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	11.580.000	40 OPD		11.257.000	97,21	40 OPD	100,00		
2.4.1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mengikuti sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	24.115.000		90 Orang	24.115.000	100,00			90 Orang	100,00
2.4.1.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	24.115.000	3 Dokumen		24.115.000	100,00	3 Dokumen	100,00		
2.4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8.800.000		1 lembaga	8.800.000	100,00			1 lembaga	100,00
2.4.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	8.800.000	4 buah		8.800.000	100,00	4 buah	100,00		
2.5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	234.140.000		5,2 %	147.451.622	62,98			5,7 %	109,62
2.5.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	59.645.000		1 Kegiatan	59.283.500	99,39			3 Kegiatan	300,00
2.5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	59.645.000	2 Dokumen		59.283.500	99,39	3 Dokumen	150,00		
2.5.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	127.985.000		100 %	44.991.122	35,15			100 %	100,00
2.5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	127.985.000	6 Layanan		44.991.122	35,15	6 Layanan	100,00		
2.5.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	46.510.000		12 Lembaga	43.177.000	92,83			26 Lembaga	216,67
2.5.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	46.510.000	65 Orang		43.177.000	92,83	65 Orang	100,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
2.6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	17.160.000		100 %	15.700.000	91,49			100 %	100,00
2.6.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	17.160.000		100 %	15.700.000	91,49			100 %	100,00
2.6.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	8.140.000	12 Dokumen		6.680.000	82,06	12 Dokumen	100,00		
2.6.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	9.020.000	2 Media		9.020.000	100,00	2 Media	100,00		
2.7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA	218.158.000		70,07 %	188.785.750	86,54			77,55 %	110,68
2.7.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	80.088.000		3 Lembaga	74.305.750	92,78			3 Lembaga	100,00
2.7.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	69.738.000	20 Organisasi		64.395.750	92,34	20 Organisasi	100,00		
2.7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	10.350.000	1 Dokumen		9.910.000	95,75	1 Dokumen	100,00		
2.7.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	138.070.000		3 Lembaga	114.480.000	82,91			3 Lembaga	100,00
2.7.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	17.255.000	100 Anak		17.255.000	100,00	100 Anak	100,00		
2.7.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	33.325.000	1 Dokumen		33.215.000	99,67	1 Dokumen	100,00		
2.7.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	28.025.000	2 Dokumen		4.775.000	17,04	2 Dokumen	100,00		
2.7.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	59.465.000	1 Dokumen		59.235.000	99,61	3 Dokumen	300,00		
2.8	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	235.175.000		0,028 %	150.136.596	63,84			0,014 %	200,00
2.8.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	51.545.000		3 Kegiatan	47.519.400	92,19			3 Kegiatan	100,00
2.8.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.545.000	120 Orang		47.519.400	92,19	120 Orang	100		
2.8.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	149.120.000		100 %	68.346.196	45,83			100 %	100,00
2.8.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	15.720.000	45 Anak		2.880.000	18,32	20 Anak	44,44		
2.8.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	133.400.000	25 Anak		65.466.196	49,08	20 Anak	80		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI					
			MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MASUKAN	%	KELUARAN	%	HASIL	%
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
2.8.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	34.510.000		2 Lembaga	34.271.000	99,31			6 Lembaga	300,00
2.8.3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	34.510.000	100 Orang		34.271.000	99,31	100 Orang	100,00		
			19.357.603.810			17.487.099.727					



Sumbawa Besar, 9 Januari 2025
 Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumbawa

I KETUT SUMADIARTA, SH
 N.P. 19691231 199403 1 094